

HIDUP BERSAMA RAKSASA



**TANIA MURRAY LI** adalah Guru Besar pada Department of Anthropology, University of Toronto. Marjin Kiri telah menerbitkan dua bukunya yang lain: *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia* (2012) dan *Kisah dari Kebun Terakhir: Hubungan Kapitalis di Wilayah Adat* (2020).

**PUJO SEMEDI** adalah Guru Besar Ilmu Antropologi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Buku karyanya adalah *Close to the Stone, Far from the Throne: The Story of a Javanese Fishing Community 1820s–1990s* (2003).

# Hidup Bersama Raksasa

MANUSIA DAN  
PENDUDUKAN PERKEBUNAN SAWIT

*Tania Murray Li*  
DAN *Pujo Semedi*

*diterjemahkan oleh Pujo Semedi*

MARJIN KIRI



*Hidup Bersama Raksasa: Manusia dan Pendudukan Perkebunan Sawit*  
Tania Murray Li dan Pujo Semedi  
© 2021 Duke University Press

Terbit pertama kali di Amerika Serikat pada 2021 dengan judul *Plantation Life: Corporate Occupation in Indonesia's Oil Palm Zone* oleh Duke University Press

*All rights reserved*

Diterjemahkan oleh Pujo Semedi  
Tata letak: Muhammad Haikal

Cetakan pertama, Mei 2022  
i - xiv + 362 hlm, 14 x 20,3 cm  
ISBN: 978-602-0788-

CV. Marjin Kiri  
Regensi Melati Mas A9/10  
Serpong, Tangerang Selatan 15323  
[www.marjinkiri.com](http://www.marjinkiri.com)

Dilarang memperbanyak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini secara cetak maupun digital tanpa izin tertulis penerbit. Setiap tindak pembajakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pengutipan secara terbatas dan relevan untuk kepentingan akademis, jurnalistik, dan advokasi diperkenankan.

Dicetak oleh GAJAH HIDUP

*Isi di luar tanggung jawab percetakan*



*The mark of responsible forestry.* Buku-buku kami dicetak di atas kertas yang telah memenuhi standar kehutanan berkelanjutan  
DNV-COC-000020 DNV-CW-000020

Marjin Kiri adalah anggota Aliansi Penerbit Independen Internasional



# Daftar Isi

<i>Prakata</i>	vii
Pendahuluan	1
1 Pembukaan Perkebunan	53
2 Menggalang Pekerja	102
3 Kapling Rapuh	154
4 Bentuk-Bentuk Kehidupan	205
5 Kehadiran Perusahaan	264
Simpulan	311
Kerjasama dan Ucapan Terima Kasih	325
<i>Daftar Pustaka</i>	333
<i>Indeks</i>	360



# Prakata

PUJO: Perkebunan adalah raksasa, raksasa yang tidak efisien dan malas, namun tetap saja raksasa. Ia makan banyak ruang. Ia serakah dan ceroboh, bikin rusak dan hancur segala di sekitarnya. Ia makhluk asing, yang aneh, dan sukar diduga. Raksasa ini macam manusia juga, tetapi kita tidak bisa menjalin hubungan lumrah manusia dengannya. Ia bisa menginjak-injak kita, memakan kita, mengunyah dan menyedap daya hidup kita lantas dimuntahkan sebagai sepeh kering. Ia sibuk menjaga hartanya. Kita tidak dapat menjinakkannya atau pula mengusirnya. Kita dipaksa hidup bersamanya. Cuma saja raksasa ini agak-agak tolol, jadi jika kita pintar, kita bisa mencuri harta bendanya.

TANIA: Perkebunan adalah mesin yang menggalang tanah, tenaga kerja, dan modal dalam jumlah besar untuk budidaya tunggal yang dijual ke pasar dunia. Pada hakikatnya perkebunan adalah konstruk kolonial, yang dibangun berdasar asumsi petani kecil tidak mampu memproduksi dengan efisien. Perkebunan bekerja dengan menguasai berbagai aspek kehidupan: lahan, waktu, flora, fauna, air, bahan kimia, manusia. Daya kuasa ini dimiliki oleh perusahaan dan dijalankan secara birokratis oleh para manajer dan asisten-asistennya.

**P**ada titik tertentu dalam riset ini kami saling bertanya, “Apa itu perkebunan?” dan datang dengan dua jawaban di atas. Seperti halnya berbagai diskusi kami, kami melihat kedua definisi tersebut berguna dalam proses analisis karena men-

dorong kami berefleksi. Mengapa raksasa? Mengapa mesin? Bisakah perkebunan adalah kedua-duanya? Definisi kami berbeda karena merupakan produk dari pengetahuan yang situasional: pengalaman kami, buku yang kami baca, jalan hidup yang kami lalui, dan perasaan yang timbul ketika kami berhadapan dengan perkebunan.

Tania melalui masa remajanya di Singapura. Pada akhir pekan, keluarganya biasa jalan-jalan ke Malaysia, menempuh jalan lama yang melewati hamparan kebun karet petani kecil yang diselang-seling dusun. Pedesaan Malaysia saat itu adalah lanskap ramai di mana kegiatan produktif dan kehidupan manusia erat terjalin. Pada sekitar 1990, jalan raya baru dibangun, melintasi perkebunan sawit: berkilo-kilo hanya ada hamparan sawit yang monoton, tidak terlihat dusun, tidak terlihat manusia. Setiap kali melewati jalan raya baru ini, Tania merasakan pemandangan ini mekanistik, mengancam, dan muram. Pengalaman ini juga membuatnya penasaran. Bagaimana perkebunan sampai ada di sana? Apa yang terjadi dengan dusun-dusun yang dulu ada di sana? Pastilah ada orang yang menggarap kebun sawit tersebut, tetapi di mana mereka dan bagaimana kehidupannya? Tania juga melakukan penelitian sarjana di hulu Sarawak di mana para petani Dayak khawatir bahwa kedatangan perkebunan sawit di dusun mereka akan mengubah mereka menjadi pekerja upahan, yang mesti tunduk pada perintah orang lain. Cara membaca dan menavigasi lanskap perkebunan menjadi tema penelitian kami di Kalimantan (Gambar PK.1).

Definisi Pujo diilhami oleh metafora raksasa yang digunakan oleh intelektual Indonesia Rendra dan Romo Mangunwijaya untuk menggambarkan kapitalisme kroni yang rakus dari pemerintahan Orde Baru Jenderal Suharto.<sup>1</sup> Pandangan ini juga berasal dari pengetahuannya tentang bagaimana perusahaan

1. Rendra, *Potret Pembangunan dalam Puisi*; Mangunwijaya, *Durga/Umayi*.

### Gambar PK.1 Desa Dayak di Sungai Tangkos



Dengan perahu sewa kami menyusuri Sungai Tangkos, anak sungai besar Kapuas di Kalimantan. Pohon-pohon besar dan dusun di sepanjang tepi sungai mengingatkan Tania akan pedalaman Sarawak pada sekitar tahun 1980, tetapi pemandangan indah dari perahu itu menipu. Lima puluh meter dari tepi sungai, tak terlihat dari perahu, terhampar ribuan hektar kebun sawit. Seandainya kami mengambil jalan yang dibangun perusahaan dan bukan lewat sungai, maka kami tidak akan melihat hutan dan dusun, hanya ada sawit sepanjang jalan. Dusun Melayu dan Dayak seperti di tepi sungai adalah enklaf kecil yang dikeluarkan dari lahan konsesi perkebunan di mana pemilik tanah asli tetap tinggal di rumah tepi sungai mereka tetapi tidak punya akses ke lahan pertanian dan tidak ada jaminan pekerjaan di perusahaan. *Foto: Pujo Semedi.*

---

perkebunan dilihat dari sudut pandang warga desa dan pekerja rendahan (sebagai manusia nyata, yang punya kehendak dan daya), dan pengetahuannya yang mendalam tentang cara kerja perkebunan.<sup>2</sup> Pujo dibesarkan di perkebunan teh di Jawa, tem-

2. Bahasa Indonesia memiliki satu kata, perusahaan, untuk korporasi dan perusahaan. Kami menggunakan istilah *korporasi* untuk badan hukum formal dan *perusahaan* untuk referensi sehari-hari tentang keberadaan perkebunan—infrastruktur, kegiatan, dan stafnya.

pat ayahnya bekerja sebagai kepala transportasi, dan ibunya menjadi guru sekolah dasar perkebunan. Baginya, hampan perkebunan yang menurut Tania aneh dan asing, adalah hal lumrah dan bagus. Dia memperhatikan bahwa anak-anak buruh pemetik teh masuk sekolah dengan pakaian robek, tanpa sepatu, dan kekurangan gizi; anak-anak administratur dan sinder tinggal di rumah yang baik, cukup makan, dan selalu mengenakan pakaian bagus. Pujo merasa kasihan kepada yang satu, dan ingin meniru yang satunya lagi.

Ketika Pujo kembali ke perkebunan teh untuk penelitian pascadoktoral, dia menemukan tatanan lain di balik pengalaman masa kecilnya: tatanan para raksasa dan pencuri. Catatan arsip menunjukkan lokasi desa-desa yang digusur perkebunan, dan dia berbicara dengan para mantan pekerja yang dipensiun tanpa gaji, dibuang layaknya kain usang. Dia menemukan bagaimana selama satu abad beroperasi perkebunan tersebut jarang menghasilkan laba. Hal ini membuatnya penasaran. Usaha macam apa ini, rutin merugi namun tetap bertahan? Sebuah pipa tanah liat yang terkubur tanah (Gambar PK.2), dan ungkapan seorang mandor pensiunan—“perkebunan itu dirompak siang dan malam, sepanjang tahun tanpa henti”—membuka jalan baru bagi pandangan Pujo.<sup>3</sup>

Sejarah perkebunan dari Jawa ini mengajak kami bertanya bagaimana sebuah perusahaan perkebunan bisa menjadi bala pendudukan (seperti raksasa) dan melibatkan berbagai pelaku (warga desa, karyawan, manajer) yang mendukung hidupnya dan juga menggerogoti asetnya. Gambar tersebut muncul jelas bahkan sejak awal penelitian kami di Kalimantan. Pujo langsung mengenalinya di hari pertama, ketika kami menyaksikan

3. Untuk sejarah pipa, lihat van Schendel, *Djolutigo*. Pipa bocor yang mengalirkan minyak, kerusakan ekologi di Delta Niger, serta pemberontakan bahan bakar dibahas dalam Watts, “A Tale of Two Gulfs.”

### Gambar PK.2 Pipa



Saat berkunjung ke perkebunan teh bersama Tania, Pujo menghentikan jip tuanya di jalan perkebunan yang menanjak dan menunjukkan keping pipa tanah liat yang rusak di parit. Pipa sepanjang 8 kilometer itu dipasang pada 1882 untuk menggelontor biji kopi dari kebun ke pabrik pengolahan. Alasannya adalah pencurian: mandor dan kuli kebun, tukang angkut, dan petani desa giat berkolusi mencuri panen kopi perkebunan. Jika digelontor lewat pipa, buah kopi akan aman dalam perjalanan. Akan tetapi pencurian terus berlanjut, pipa tanah liatnya dipecah di sana sini, bahkan pipa logam lebih mahal dan kuat tidak menghentikan pencurian. Masalah pencurian ini agak terpecahkan ketika tanaman perkebunan diubah dari kopi menjadi teh, yang tidak ada pasar lokalnya. *Foto: Pujo Semedi.*

---

para karyawan perkebunan duduk di warung kopi tepi sungai sejak jam 9:00 pagi: “Semua orang ini mencuri.” Hal yang mengejutkan Pujo bukanlah bahwa para karyawan mencuri waktu, melainkan keberanian mereka: duduk nongkrong di warung kopi dengan seragam kerja, secara terbuka tidak peduli dengan disiplin perusahaan.

Di perkebunan Jawa yang dipelajari Pujo, pencurian ada-

lah perkara rutin tetapi dijalankan agak terselubung; berlangsung dengan halus dan dijalin dengan nilai moral tertentu. Para administratur dan sinder Belanda membayar diri sendiri dengan gaji dan bonus tinggi, menyalahkan kerugian perkebunan kepada penyakit karat daun kopi. Para mandor Jawa mendongkrak harga pupuk kandang berkualitas rendah, praktik yang ternyata terus berlanjut setelah perkebunan dinasionalisasi pada 1958. Mandor mencuri tenaga kerja dengan mengirim kuli ke kebun kopi pribadi, dengan memasukkan nama kosong, (*nggundul*, bahasa Jawa) ke dalam daftar kuli, atau dengan menggelembungkan jumlah hari kerja (*ngeroi*). Mereka mengambil upah pemetik teh dengan menambah potongan keranjang; para pemetik juga curang, mereka meletakkan hasil petikan di bawah hujan supaya makin berat saat ditimbang. Mencuri dari perusahaan didukung oleh anggapan umum bahwa perusahaan itu kaya dan boros. Para pekerja tidak menyebut praktik ini mencuri (*nyolong*) tetapi *ngutil*—bahasa Jawa untuk mengupas kutil, membuang sesuatu yang tidak berguna bagi pemiliknya tetapi berpotensi berguna bagi orang lain. Para sinder berusaha keras menghentikan pencurian oleh para buruh, tetapi buruhnya hanya tertawa mengejek: “Pencuri selalu lebih pintar dari pulisi.”

Pengambilan upah buruh oleh pimpinan dipahami oleh kedua belah pihak sebagai konsekuensi dari hierarki: mandor berhak atas penghasilan tambahan, yang disebut *pangan mandor*. Pengambilan sebagian porsi upah buruh oleh mandor menyebabkan kebencian ketika melewati jumlah “wajar” (10 persen). Karyawan menyebut pencurian oleh administratur dan sinder, sebagai *angkut-angkut*, membawa sesuatu dalam jumlah banyak. Administratur dan sinder yang sangat korup disebut *wong rosa*, orang kuat, yang mampu membawa beban berat. Di antara mereka sendiri, para sinder tidak menyebut korupsi tetapi “mengumpulkan vitamin dan makanan suplemen,” menunjukkan bahwa sebagai orang berpangkat mereka berhak mendapatkan

makanan kualitas tinggi. Ketika ada kawan dipanggil oleh kantor audit internal perusahaan, mereka mengatakan si kawan sedang kena masalah. Artinya kawan yang sial ini telah mengambil terlalu banyak, sehingga menimbulkan gosip yang intens dan membuat auditor internal terlihat konyol jika mereka tidak melakukan apa-apa. Biasanya tindakan disipliner yang dikeluarkan hanya hukuman ringan seperti di-*nonjob*-kan, dipindah ke “posisi kering” yang tidak punya mandat mengelola anggaran kerja, atau paling tinggi dipensiun dini. Di kalangan karyawan dan kuli rendahan yang hanya bisa mencuri kecil-kecilan aset material perusahaan untuk keuntungan pribadi, aturannya adalah jangan sampai tertangkap basah.

Penelitian etnografi dan sejarah perkebunan teh membuat Pujo susah hati, malu, dan juga sedikit geli. Rasa geli muncul dari penggunaan bahasa yang sangat ironis oleh orang-orang di perkebunan dalam menggambarkan dunia mereka. Rasa malu muncul dari menyaksikan kawan-kawan dan informannya terlibat praktik yang melanggar kepatutan. Kesedihan datang dari menyaksikan kesempatan yang sia-sia terbuang. Penelitiannya memaksanya untuk mengakui bahwa selama lebih dari satu abad kekayaan alam Indonesia telah dijajah tidak hanya oleh orang asing tetapi juga oleh bangsanya sendiri, sebuah pola yang dia lihat berulang di Kalimantan. Tapi Pujo menggabungkan kesedihan dengan kemarahan: kemarahan yang ditujukan kepada raksasa yang menduduki tanah orang, menghancurkan mata pencaharian, dan mengumpulkan kekayaan sambil mengubah semua orang yang hidup di bawah kuasanya menjadi pencuri.

Buku kami mengeksplorasi bentuk-bentuk kehidupan yang dimunculkan oleh pendudukan perusahaan perkebunan di kawasan sawit Indonesia. Penelitian kami jalankan pada periode 2010–2015, bersama dengan lebih dari seratus mahasiswa dari dua universitas kami. Mereka masing-masing menghabiskan satu hingga dua belas bulan penelitian lapangan (Gambar

**Gambar PK.3** Kedatangan

Catatan tentang kedatangan sangat menonjol dalam laporan para mahasiswa, memungkinkan kita untuk melihat kawasan perkebunan melalui mata mereka. Sebagian besar mahasiswa membayangkan Kalimantan sebagai negeri suku yang eksotis dan hutan tropis yang kaya, tetapi mereka kecewa. Perjalanan 18 jam dengan perahu barang menyusuri Sungai Kapuas yang penuh angkutan lalu lalang ternyata membawa mereka ke kawasan industri dengan tambang bauksit di kiri dan kanan, pangkalan tebaran kayu hutan terapung, kota perdagangan yang ramai, dan hamparan perkebunan tanpa akhir. Ketika tiba di lokasi penelitian, para pekerja perkebunan Jawa memperingatkan mahasiswa bahwa orang Dayak berbahaya. Ini adalah karikatur rasial yang dijejalkan ke pikiran mahasiswa saat mereka memasuki medan sosial yang sebelumnya tidak mereka kenal. *Foto: Vuvut Z.*

---

PK.3). Metode kerja lapangan kolaboratif kami uraikan dalam lampiran “Kerjasama dan Ucapan Terima Kasih”. Sekarang kami mengajak pembaca sekalian melakukan perjalanan ke dalam kawasan perkebunan sambil mencoba memahami bentuk-bentuk kehidupan yang muncul di sana.

# Pendahuluan

Perkebunan merupakan mesin penggalang lahan, tenaga kerja, dan modal di bawah manajemen terpusat guna mencetak laba; perkebunan juga merupakan teknologi politik yang mengatur wilayah dan manusia, menghasilkan subjek baru, dan membuat dunia baru. Perbudakan orang Afrika untuk dipekerjakan di perkebunan di Amerika menghasilkan formasi sosial baru yang dinamakan kawasan Atlantik Hitam.<sup>1</sup> Perkebunan dengan tenaga budak menjalankan budidaya dan pengolahan hasil pertanian dengan skala industrial, dengan manajemen ruang, waktu, dan tugas modern jauh mendahului zaman industri manufaktur Eropa.<sup>2</sup> Gula, kopi, dan teh yang diproduksi di “pabrik di kebun” tropis memasok kenikmatan murah yang terjangkau kelas pekerja di Eropa, dan memberi energi untuk Revolusi Industri.<sup>3</sup> Perkebunan juga merupakan landasan ekspansi kolonial Eropa di Asia dan Afrika pada periode 1870–1940 ketika modal yang monopolistik menyebar ke seluruh penjuru dunia untuk mengeruk keuntungan besar.<sup>4</sup>

Ekspansi perkebunan kontemporer juga tidak kalah genting dan skalanya menembus tingkat yang belum pernah terjadi

1. Lihat C. L. R James, *Black Jacobins*; Gilroy, *Black Atlantic*.
2. Mengenai modernisme berlebihan lihat J. Scott, *Seeing Like a State*.
3. Mengenai transformasi global akibat perkebunan, lihat Mintz, *Sweetness and Power*; Wolf, *Europe*.
4. Lihat Daniel, Bernstein, dan Brass, *Plantations, Proletarians and Peasants*.

sebelumnya. Sejak tahun 2000, produksi gula berbasis perkebunan telah berkembang pesat di Brasil; dan di Indonesia dan Malaysia jutaan hektar hutan dan ladang dibabat oleh perusahaan perkebunan untuk menanam sawit. Minyak sawit mentah, komoditas yang dihasilkan perkebunan ini, merupakan bahan utama dalam produksi massal makanan cepat saji, deterjen, kosmetik, dan minyak goreng serta bio-diesel.<sup>5</sup> Setengah dari produk di supermarket Eropa-Amerika mengandung minyak sawit, yang membuat harganya jadi lebih murah.<sup>6</sup> Indonesia, fokus penelitian kami, memproduksi 50 persen pasokan minyak sawit dunia, dan sebagian besar—sekitar 60 persen—diekspor ke India, di mana minyak ini populer sebagai minyak goreng harga terjangkau.<sup>7</sup> Minyak sawit mendatangkan keuntungan luar biasa bagi perusahaan perkebunan dan memaksa sekitar lima belas juta orang *hidup bersama raksasa*, kehidupan manusia yang kami eksplorasi di buku ini.<sup>8</sup>

Ditinjau dari jauh bentuk perkebunan adalah ikon modernitas, yang kadang ditingkah dengan patriotisme. Hamparan kebun yang tertata rapi serta penggunaan lahan dan tenaga kerja dalam jumlah besar diajukan sebagai klaim efisiensi dan pe-

5. Lihat Cramb dan McCarthy, *Oil Palm Complex*, untuk tinjauan yang luar biasa tentang industri sawit di Indonesia dan Malaysia.
6. Tania melihat acara TV Prancis tentang dua keluarga sadar lingkungan yang pergi membeli daftar belanjaan yang sama. Keluarga yang dengan sengaja tidak membeli produk-produk yang mengandung minyak sawit memang bisa mendapat produk pengganti, tetapi harganya dua kali lebih mahal.
7. Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Perdagangan Luar Negeri*, 13. Setelah ekspor minyak bumi jatuh pada 1980-an, minyak sawit menjadi penyumbang terbesar ekspor Indonesia pada tingkat 16 persen, dengan nilai tahunan sekitar Rp280 triliun.
8. Perkiraan kami sekitar 15 juta penduduk bekerja di perkebunan dan hidup di sekitarnya. Budidaya sawit mempekerjakan sekitar 3,2 juta orang, yang menghidupi 12,8 anggota keluarga. Lihat Hawkins, Chen, dan Wigglesworth, *Indonesian Palm Oil Production Sector*, 8. Perhitungan ini didasarkan pada asumsi tiap pekerja menangani 4 hektar kebun sawit; rasio tenaga kerja dibahas dalam Cramb dan McCarthy, "Characterising Oil Palm Production," 66n9.

nguasaan teknis tingkat tinggi. Di Indonesia, para manajer kebun yang belajar di Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) membaca pemikiran Max Weber tentang keunggulan birokrasi modern dan perencanaan rasional. Namun ternyata, efisiensinya perlu dipertanyakan. Di sebagian besar wilayah dunia, tanaman yang dulu merupakan budidaya perkebunan kini ditanam di kebun para petani kecil yang sering justru sangat efisien dalam hal penggunaan lahan dan tenaga kerja, dan kebun kecil jauh lebih mudah dikelola.<sup>9</sup> Namun demikian, klaim yang mengunggulkan efisiensi perkebunan besar terus diulang dan diperbarui secara nasional maupun global. Pada 2011, misalnya, sebuah laporan Bank Dunia berpendapat bahwa separuh dari potensi lahan pertanian dunia tidak digunakan dan sebagian besar sisanya kurang dimanfaatkan. Klaim tersebut didukung dengan peta dan grafik yang menandai “kesenjangan produktivitas” menurut wilayah, yang diukur menurut perbedaan hasil dalam dolar per hektar lahan yang diolah petani kecil dan hasil dolar potensial di bawah sistem tanaman tunggal. Laporan tersebut menyatakan bahwa penggunaan lahan yang tidak efisien bukan hanya boros tetapi juga tidak baik untuk lingkungan: sementara menyerahkan kegiatan produksi pada pertanian yang efisien akan menciptakan lapangan kerja, membantu pasokan pangan populasi global yang sedang berkembang, dan melindungi hutan serta padang rumput guna mengurangi perubahan iklim.<sup>10</sup>

Pendukung perusahaan sawit Indonesia mempertahankan ekspansi mereka lewat narasi efisiensi tingkat global ini: minyak sawit memberi makan dunia dan harus diproduksi di perke-

9. Byerlee, “Fall and Rise Again.”

10. Deninger et al., *Rising Global Interest in Farmland*. Untuk kritik terhadap laporan ini lihat De Schutter, “How Not to Think”; Li, “Centering Labour” dan “What Is Land?”

bunan besar dan modern.<sup>11</sup> Berdasarkan klaim tersebut, perusahaan perkebunan mendapat izin menduduki sekitar 40 persen lahan pertanian Indonesia.<sup>12</sup> Seperti yang akan kami jelaskan, dominasi perkebunan ini sebenarnya bukan didukung oleh keunggulan agronomi atau efisiensi produktif, melainkan oleh dukungan politik: ekonomi politik, teknologi politik, dan rezim impunitas yang memang merupakan ciri khas lingkungan politik Indonesia.

Berangkat dari pendekatan ekonomi politik, studi kritis mengenai perampasan tanah tingkat global yang dipicu oleh krisis pangan dan keuangan 2007–2009 mengungkap adanya minat baru perusahaan transnasional untuk mengekstraksi laba dari wilayah pedesaan. Studi tersebut juga mengungkap keterlibatan perusahaan nasional, dan bagaimana baik perusahaan asing maupun nasional semua menerima dukungan penuh negara.<sup>13</sup> Studi-studi ini umumnya menyoroti kerusakan akibat kehadiran perusahaan di wilayah pedesaan: hilangnya tanah adat, mata pencaharian pedesaan yang fleksibel, ekosistem yang beragam, dan lingkungan hutan yang sehat untuk mitigasi perubahan iklim. Melengkapi pertanyaan yang berfokus pada laba yang diraup perusahaan dan kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat, *Hidup Bersama Raksasa* menawarkan catatan etnografis yang membumi tentang hubungan sosial, ekonomi, dan politik yang digariskan oleh perusahaan saat mereka mengubah ruang pedesaan menjadi kawasan perkebunan, dan bentuk kehidupan yang mereka ciptakan.

11. Lihat “Hasil Studi IUCN, Pencerahan untuk Kampanye Hitam Kelapa Sawit.” *Kompas*, 4 Februari 2019; untuk kritik lihat Colchester, “Indonesian Government.”
12. Hawkins, Chen, dan Wigglesworth, *Indonesian Palm Oil Production Sector*, 8.
13. Untuk ulasan ekstensif dalam studi perampasan lahan, lihat B. White et al., “New Enclosures.” Mengenai insentif perusahaan untuk menguasai lahan pertanian, lihat Fairbairn, *Fields of Gold*.

Penelitian lapangan yang kami lakukan dari 2010 hingga 2015 berfokus pada dua perkebunan di Tanjung, sebuah kecamatan sawit di Sanggau, Kalimantan Barat.<sup>14</sup> Perkebunan pertama adalah Natco, satu unit kebun milik perusahaan negara PTPN seluas 5.000 hektar. Natco beroperasi sebagai dunia semi-tertutup di mana manajer melakukan kontrol ketat atas kehidupan pekerja yang hidup di area perkebunan. Selain untuk menjalankan tugas produksi dan meraih laba, Natco juga mengusung mandat sosial utopis seperti pada kota-kota perusahaan abad ke-20 di Amerika Serikat, Fordlandia di Brasil, dan kota tambang di sabuk tembaga Zambia di mana para pekerja dan keluarga mereka mendapat fasilitas kehidupan modern sebagai contoh untuk masyarakat luas.<sup>15</sup> Ruang, waktu, dan mentalitas dibentuk melalui tuntunan paternalistik perusahaan.<sup>16</sup> Perkebunan kedua adalah Priva, milik perusahaan swasta Indonesia dengan konsesi 39.000 hektar. Priva memiliki tapal batas wilayah yang keropos di sana-sini dan lebih sedikit mengusung tujuan sosial. Sejumlah kecil pekerja tinggal di perumahan perusahaan, sementara yang lain direkrut dari desa-desa sekitar dan setiap hari pulang pergi untuk bekerja. Sebagian besar produksi Priva dilakukan oleh petani lokal dan pendatang yang terikat kontrak dengan perusahaan sampai mereka melunasi utang yang mereka tanggung untuk persiapan kapling sawit seluas 2 hektar. Terselip di dalam dan terjepit di antara kedua perkebunan ini adalah dusun-dusun bekas pemilik tanah yang

14. Nama kedua perkebunan, orang, dan tempat di bawah kabupaten semuanya samaran.
15. Lihat Ferguson, *Expectations of Modernity*; Dinius dan Vergara, *Company Towns in the Americas*; Grandin, *Fordlandia*.
16. Mintz dan Wolf berpendapat bahwa dalam perkebunan modern, birokrasi perkebunan menggantikan paternalisme, yang lebih merupakan ciri *hacienda*; namun paternalisme dan "despotisme yang didelegasikan" merupakan tema penting dalam studi pekerja perkebunan di Afrika. Lihat Addison, *Chiefs of the Plantation*; Du Toit, "Micro-Politics of Paternalism"; Rutherford, *Farm Worker Labor Struggles*.

mencari nafkah dari petak-petak kecil kebun yang tersisa dan dari pekerjaan lepas di perusahaan. Menurut definisi kami, dusun-dusun tersebut adalah bagian dari kawasan perkebunan, dan perjuangan warganya sangat berpengaruh di dalamnya.

Situs studi kami sangat spesifik dan spesifikasi tersebut kami tangkap guna mendapat pengertian mengenai bentuk kapitalisme yang dijalankan dalam format perusahaan dewasa ini. Unsur-unsur yang membentuk perkebunan (tanah, tenaga kerja, modal, benih, bahan kimia, teknologi, pasar, manajemen, kedudukan hukum) semuanya generik, namun konfigurasi mereka pada konjungtur tertentu selalu unik. Kapital yang beredar global mungkin terlihat sebagai elemen umum, tetapi uang hanya akan menjadi kapital saat ia disambungkan dengan lahan dan tenaga kerja dalam berbagai relasi yang konkret. Seperti yang dikatakan Mezzadra dan Neilson, setiap ekspresi kontemporer kapitalisme bersifat spesifik, sehingga pendekatan etnografis sangat cocok untuk mengeksplorasi “formasi spasial, sosial, hukum dan politik yang harus dihadapi kapital karena untuk bisa hidup ia harus terjalin dalam konstelasi padat manusia dan lingkungannya.”<sup>17</sup> Konstelasi padat yang memungkinkan perusahaan menangguk laba dan menciptakan tata kehidupan baru—hidup bersama raksasa—adalah fokus dari studi kami.

Penelitian kami menjalin dua jalur analisis yang sering dipisahkan. Satu jalur, ekonomi politik, kami tarik dari Marx, yang mempertanyakan cara-cara modal, tanah, dan tenaga

17. Mezzadra dan Neilson, *Politics of Operations*, 3. Sandro Mezzadra dan Brett Neilson menekankan dimensi imajinatif proyek-proyek kapitalisme dan proses kerja untuk implementasinya. Periksa juga agenda feminis untuk menempatkan riset mengenai kapitalisme di lokasi, ras, budaya, kekerabatan dan keragaman spesies kehidupan di lingkungan yang spesifik, dalam Bear et al., “Gens.” Kebanyakan riset di bidang ekologi politik, antropologi lingkungan, dan geografi manusia ini sangat memperhatikan elemen keruangan, materialitas, dan praktik-praktik yang membawa makna.

kerja digalang untuk mencetak laba bagi sebagian orang dan menimbulkan pemiskinan bagi yang lain.<sup>18</sup> Kami mendasarkan diri pada karya para peneliti sirkulasi kapital global, perampasan tanah, pembentukan kelas agraris, dan rezim-rezim perburuhan.<sup>19</sup> Benang merah kedua, teknologi politik, kami tarik dari Foucault dengan fokus pada produksi subjek dan pemerintahan wilayah dan populasi. Teknologi politik, menurut Foucault, tidaklah dipotong dari selembar kain utuh. Mereka terdiri dari “wacana, institusi, bentuk arsitektur, keputusan peraturan, hukum, tindakan administratif, pernyataan ilmiah, proposisi moral dan filantropi.”<sup>20</sup> Mereka disatukan untuk memenuhi bukan hanya satu tujuan utama (misalnya, keuntungan perusahaan), melainkan sejumlah tujuan (produksi, pendapatan, pembangunan, keteraturan, prestise, kesejahteraan) yang tidak selalu seiring sejalan.<sup>21</sup> Kami mengikuti studi-studi yang menggabungkan kedua pendekatan tersebut untuk mempelajari teknologi politik pemerintahan kolonial dan masa kini dan penciptaan frontier sumberdaya sebagai ruang yang penuh potensi produktivitas dan keuntungan.<sup>22</sup> Penelitian berulang, studi pustaka, dan analisis membawa kami untuk berteori tentang peran konstitutif pendudukan perusahaan, puing-puing imperialisme,

18. Marx, *Capital*.

19. Mengenai pengambilan lahan, akumulasi primitif, dan “akumulasi melalui perampasan”, lihat Harvey, *New Imperialism*. Untuk kajian mengenai perampasan lahan di Asia Tenggara, lihat Baird, “Problems for the Plantations”; Kenney-Lazar, “Relations of Sovereignty”; Hall, “Land Grabs, Land Control” dan “Primitive Accumulation, Accumulation by Dispossession”; Schoenberger, Hall, dan Vandergeest, “What Happened.” Mengenai rezim tenaga kerja, lihat Arnold dan Campbell, “Labour Regime Transformation in Myanmar”; Li, “Price of Un/Freedom.”

20. Foucault, *Power/Knowledge*, 194.

21. Foucault, “Governmentality.”

22. Periksa, antara lain, Cooper dan Stoler, *Tensions of Empire*; D. Scott, *Conscripts of Modernity*; Mbembe, *On the Postcolony*; Li, *Will to Improve*; Moore, *Suffering for Territory*; Bridge, “Material Worlds”; Watts, “Tale of Two Gulfs”; Peluso dan Lund, “New Frontiers of Land Control”; Eilenberg dan Cons, *Frontier Assemblages*; Robbins, *Political Ecology*.

dan rezim ekstraktif dalam pembentukan kehidupan perkebunan. Selanjutnya akan kami uraikan rangkaian teori tersebut dan garis besar daya penjelas yang ditawarkannya untuk studi ini.

### **Pendudukan Perusahaan**

Kami berusaha memahami bentuk kehidupan yang kami temui di lapangan dengan berteori bahwa pendudukan perusahaan adalah teknologi politik utama kawasan perkebunan. Dalam bagian ini kami akan mengurai komponen-komponen pendudukan oleh perusahaan, mengamati mandat perusahaan perkebunan, kemudian menguraikan wawasan dari analisis pendudukan tersebut.

#### *Mandat Perusahaan*

Ahli geografi ekonomi Joshua Barkan mengajukan konsep mandat perusahaan, yakni mandat kedaulatan yang sejak Abad Pertengahan diberikan pemerintah kepada pihak swasta yang memungkinkan mereka memegang mandat ganda: mencetak laba dan melayani kepentingan umum.<sup>23</sup> Perusahaan swasta membangun dan menjalankan layanan kereta api dan sistem air bersih, kota dan universitas; mereka mengorganisir perdagangan imperial dan program kolonisasi; dan selama ratusan tahun mereka memiliki dan mengelola perkebunan. Guna memenuhi mandat gandanya, perusahaan diberi hak untuk memprivatisasi harta publik (tanah, air, hutan) dan melakukan tindak merugikan bagi manusia dan spesies yang dianggap menghambat kerjanya. Sehubungan dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh perusahaan, Barkan membingkai ulang pertanyaan penting Foucault tentang *biopower* (“Mengingat bahwa tujuan kekuatan

23. Pembahasan mengenai mandat ganda untuk pemerintahan kolonial di Afrika seperti yang diusulkan oleh Lord Lugard, lihat Moore, *Suffering for Territory*, 13.

ini pada dasarnya adalah untuk menghidupkan, bagaimana bisa kok malah membawa kematian?") untuk bertanya: "Bagaimana tatanan global kapitalisme perusahaan, yang diciptakan dan berulang kali dibenarkan karena kemampuannya 'untuk meningkatkan kesejahteraan...', ternyata menghasilkan sistem yang secara rutin menolak penyediaan perumahan, pakaian, makanan, pekerjaan, dan obat-obatan esensial; yang menempatkan sekelompok masyarakat pada kehidupan yang tidak aman dan risiko lingkungan?"<sup>24</sup> Ketegangan antara laba perusahaan, masalah umum, dan perusakan yang disahkan negara ini kami jadikan sebagai landasan analisis.

Guna memenuhi kepentingan publik, undang-undang di Indonesia secara eksplisit mendelegasikan kedaulatan kepada perusahaan perkebunan. UU Penanaman Modal tahun 2007 dimulai "bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan..." Dengan dasar tersebut undang-undang memfasilitasi investasi asing dan domestik guna mencapai tujuan pembangunan nasional. UU Perkebunan No. 39 Tahun 2014 menyatakan bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ... ; bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan."

24. Barkan, *Corporate Sovereignty*, 161.

Fokus pemerintah Indonesia pada pertumbuhan ekonomi yang dipimpin perusahaan sebagai inti dari strategi pembangunan nasional meningkat pada 2020 dengan diluncurkannya RUU Cipta Kerja yang secara drastis merombak undang-undang perantaraan, tenaga kerja, dan lingkungan untuk memudahkan investasi asing. RUU itu disambut protes publik, dan banyak orang Indonesia membaca kalimat tentang pembangunan yang dipimpin perusahaan dan sumbangannya terhadap “kemakmuran dan kesejahteraan rakyat” dengan curiga. Namun di sini tidak terjadi perdebatan nasional yang sungguh-sungguh tentang apa yang merupakan “kesejahteraan rakyat” atau cara terbaik untuk mencapainya. Maldistribusi kemakmuran di Indonesia saat ini bukan perkara main-main: Indonesia adalah negara ketiga yang paling tidak setara di dunia (setelah Rusia dan Thailand), di mana empat orang memiliki kekayaan lebih dari 100 juta orang.<sup>25</sup> Namun posisi oligarki sulit ditantang, dan narasi neoliberal bahwa perusahaan menghasilkan kekayaan yang mengalir ke bawah guna mendatangkan “kemakmuran rakyat” dididungungkan di mana-mana. Perusahaan perkebunan tumbuh subur di lingkungan semacam ini.

Atas nama kemaslahatan umum, perusahaan perkebunan Indonesia diberi banyak hak istimewa. Undang-undang mendukung perusahaan, memberi mereka akses untuk mendapatkan lahan dengan subsidi, kredit, dana talangan, dan berbagai bentuk “perlindungan kesejahteraan perusahaan” yang membebaskan mereka dari keharusan kapitalis beroperasi secara efisien atau bersaing ketat di pasar bebas.<sup>26</sup> Hak istimewa dan mono-

25. Periksa Oxfam, *Towards a More Equal Indonesia*, 8; World Bank, *Indonesia's Rising Divide*, 18.

26. Mengenai kesejahteraan perusahaan, lihat Hall, “Rethinking Primitive Accumulation,” 1197; Harvey, “Neoliberalism as Creative Destruction.” Hukum, kebijakan, dan narasi pembangunan yang mendukung kepentingan perkebunan dibahas dalam Susanti dan Maryudi, “Development Narratives”; Cramb dan McCarthy, *Oil Palm Complex*; Byerlee, “Fall and Rise Again”; Dove, *Banana Tree*

poli mereka melekat dalam apa yang oleh antropolog Hannah Appel disebut “dimensi kapitalisme yang sah” yang didukung oleh undang-undang, kontrak, dan laporan perusahaan.<sup>27</sup> Seperti yang akan kami tunjukkan, perusahaan juga didukung oleh pejabat dan politisi di setiap tingkat pemerintahan yang ditugaskan secara resmi (dan menikmati kompensasi pribadi) untuk memuluskan kerja perusahaan. Instansi pemerintah seharusnya mengatur perusahaan, tetapi pada akhirnya semua menjadi masalah internal—pemegang kuasa yang mengawasi organ-organ pemerintahannya sendiri, macam kepala mengarahkan tangan. Satu hal yang genting, merusak dan menimbulkan kerugian ke orang lain adalah bagian yang diizinkan oleh mandat perusahaan. Perusahaan perkebunan Indonesia memonopoli tanah dan air; mereka menghancurkan hutan dan menyemprotkan racun kimia; menjerat petani kontrak dengan utang; dan menyingkirkan manusia serta spesies yang tidak berguna bagi kepentingan mereka. Kerusakan-kerusakan semacam ini sudah diketahui para ahli namun dinormalisasi sebagai biaya yang diantisipasi tetapi tidak dihitung, biaya yang harus dibayar untuk membawa kemakmuran ke daerah-daerah terpencil.

Berdasarkan karya filsuf Giorgio Agamben, Barkan mengeksplorasi “paradoks *the sovereign ban*, di mana pengecualian hukum dan pengabaian atas sekelompok masyarakat dibenarkan ketika hal ini vital bagi keamanan orang-orang yang berkuasa.”<sup>29</sup> Kami memeriksa cara kerja paradoks ini di Tanjung, di mana perusahaan mengusir mantan pemilik tanah dan melantarkan pekerja tua yang sakit tanpa mata pencaharian. Bagi Barkan, kaum terlantar ini memenuhi kriteria Agamben tentang *homo sacer*: orang-orang yang dapat dibunuh atau di-

*at the Gate*; Pichler, “Legal Dispossession”; Paoli et al., *Oil Palm in Indonesia*.

27. Lihat Appel, *Licit Life of Capitalism*.

28. Mengenai perlawanan terhadap peraturan, lihat Barkan, *Corporate Sovereignty*.

29. Barkan, *Corporate Sovereignty*, 7.

biarkan mati, tetapi kematian mereka tidak diakui sebagai pengorbanan karena hidup mereka dianggap tidak bernilai ekonomi maupun moral.

Di Tanjung, para manajer perkebunan memilih mana orang dan spesies yang akan dipelihara dan mana yang akan diabaikan. Orang-orang yang tidak diinginkan ini kemudian melawan melalui pencurian dan pemerasan sebagai jalan untuk mengambil bagian kecil dari harta perkebunan; mereka juga berusaha untuk memperluas tanggung jawab moral perusahaan dan bersikeras agar pengorbanan mereka kepada perusahaan diakui dan diberi kompensasi. Mengorbankan diri untuk kepentingan bersama memiliki nilai di Indonesia—pejuang yang mengorbankan hidup mereka untuk mencapai kemerdekaan dari Belanda salah satu contohnya. Namun pengorbanan yang tidak diakui adalah pengorbanan sia-sia, mati konyol, merupakan pengingkaran pada si korban dan melahirkan sakit hati. Kami mengeksplorasi pengingkaran ini sebagai situasi material, terwujud, dan menimbulkan rasa di hati.

### *Pendudukan*

Pengingkaran pada pengorbanan para petani di kawasan perkebunan Tanjung berpangkal pada daya perusahaan yang hebat sebagai bala pendudukan. Pendudukan adalah penguasaan suatu wilayah dan penghuninya oleh kekuatan asing tanpa persetujuan warga tersebut. Pendudukan sama dengan penjajahan, seperti dalam penyebutan untuk pemerintahan kolonial Belanda. Ketika kami mendengar penduduk desa berkata, “Kami dijajah perusahaan,” mereka menunjuk pada ketidakabsahan: pada aturan yang dibuat tanpa persetujuan dan merugikan mereka. Pernyataan tersebut juga menunjuk pada adanya kekuasaan yang dibangun di atas pembagian sosial berdasar penilaian orang setempat sebagai kaum tertinggal, bodoh, rendah. Penduduk desa yang tanahnya diduduki perusahaan tidak banyak

bersuara atau bahkan sama sekali tidak memiliki suara dalam perkara ini. Mereka dianggap tidak mampu berdialog dengan pejabat pemberi konsesi lahan perusahaan, atau dengan pengurus perkebunan. Seperti di masa kolonial, pemisahan sosial yang ekstrem antara pejabat pemerintah atau tuan kebun dengan rakyat jelata penghuni desa membuat konsep dialog di antara kedua pihak tidak masuk akal.

Istilah pendudukan biasa mengacu pada penguasaan militer asing atas suatu wilayah dan penaklukan masyarakatnya. Kami memperluas istilah pendudukan untuk berteori mengenai kehadiran perusahaan perkebunan; perluasan ini memungkinkan kami mengeksplorasi tiga hubungan utama.

Pertama, pengaturan spasial dan politik baru: perampasan paksa dan pendudukan wilayah oleh sebuah perusahaan, kehadiran polisi bersenjata dan satuan pengamanan yang bertugas melindungi properti perusahaan, dan reorganisasi kekuasaan atas masyarakat dan wilayah hidup mereka. Seperti dicatat oleh para peneliti wilayah pendudukan Palestina, format wilayah dan politik pendudukan jamak wujudnya.<sup>30</sup> Di Tanjung, wilayah inti perkebunan berupa satu hamparan luas kebun dengan batas yang jelas dan masyarakat penghuninya hidup di bawah peraturan ketat dan langsung perusahaan. Wilayah plasma di mana petani bekerja menghasilkan buah sawit yang dikirim untuk digiling di pabrik milik perusahaan diatur secara tidak langsung melalui infrastruktur politik dan material yang dibentuk oleh perusahaan (tata letak blok kebun dan pemukiman, jalan, koperasi, skema kredit, jadwal panen). Sementara wilayah terjepit di tepi sungai dan kantong-kantong dusun sisa yang biasa disebut enklaf tampak seperti desa biasa dan tidak memi-

30. Lihat Weizman, *Hollow Land*; Makdisi, "Architecture of Erasure." Mengenai minyak dan topografi ekstraksi yang tidak merata serta kekuasaan di Delta Niger, lihat Watts, "Tale of Two Gulfs."

liki perubahan formal dalam status hukumnya. Namun melalui berbagai jalur tertentu sebenarnya mereka juga menjadi subjek pendudukan perusahaan.

Keragaman tambal sulam pengaturan spasial perkebunan di atas menunjukkan bagaimana pendudukan perusahaan sangat berbeda dari pendudukan oleh *hacienda* di Amerika Latin, seperti diungkap dalam studi komparatif antropolog Sydney Mintz dan Eric Wolf. Dalam *hacienda* tuan tanah memegang kekuasaan resmi terhadap tanah serta penduduknya di suatu wilayah yang luas, seperti kekuasaan negara atas suatu negeri dan segenap rakyatnya.<sup>31</sup> Di sini, produksi adalah urusan nomor dua. Di perkebunan prioritas tersebut dibalik. Di Indonesia hanya mandat produksi yang oleh negara secara resmi diberikan kepada perusahaan. Sedangkan kepentingan yang lain, seperti perluasan kekuasaan pemerintah atas wilayah pedalaman, kepengaturan masyarakat, dan pembangunan daerah terpencil dijadikan produk sampingan.<sup>32</sup>

Tatanan politik baru yang dipasang oleh pendudukan perusahaan tidak pernah diumumkan terbuka. Secara legal perusahaan tidak bertanggungjawab atas kemakmuran warga yang tinggal di luar batas konsesi. Namun perusahaan telah mengubah kehidupan mereka secara drastis: melucuti akses mereka ke lahan, air dan sumber nafkah, serta menata pranata politik mereka agar cocok dengan kemauan perusahaan. Seperti warga desa di wilayah pendudukan Palestina yang dijelaskan oleh Saree Makdisi, warga yang tinggal di enklaf dikurangi hak-haknya sebagai warga negara melalui mekanisme yang tidak per-

31. Wolf dan Mintz, "Haciendas and Plantations." Lihat Krupa, "State by Proxy," mengenai pemerintahan tidak langsung melalui tangan swasta di Amerika Latin; di Africa, periksa Mbembe, *On the Postcolony*.

32. Peran konsesi dalam berbagai proyek teritorialisasi negara ditelusuri oleh Hardin, "Concessionary Politics"; Vanderveest dan Peluso, "Territorialization and State Power."

nah ditulis secara hukum. Perusahaan dan pejabat pemerintah yang menjadi kroninya terlibat dalam apa yang oleh Makdisi disebut sebagai “pengingkaran atas pengingkaran”—pengingkaran bahwa pendudukan benar terjadi, pengingkaran bahwa ada masyarakat di wilayah pendudukan, atau pengingkaran adanya pihak yang menderita kerusakan.<sup>33</sup>

Implikasi “pengingkaran atas pengingkaran” terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat sangat mendalam di Indonesia. Warga desa di kawasan perkebunan diklasifikasikan sebagai rakyat biasa yang menikmati hak hukum yang digariskan konstitusi, termasuk di sini hak asasi manusia yang ditegakkan oleh Komnas HAM. Namun penelitian etnografis telah menunjukkan bahwa hak sebagai warga negara di Indonesia pada dasarnya bukanlah masalah hukum.<sup>34</sup> Istilah rakyat menandai hak hukum dan hubungan hierarkis yang kuat (kadang disebut feodal) di mana rakyat kecil harus bergantung pada mediasi orang besar yang berkuasa, agar bisa menjalankan usaha atau mendapat perlindungan ketika kelangsungan hidup mereka terancam. Orang yang berkuasa diharapkan membantu rakyat biasa menyelesaikan masalah. Orang biasa, orang desa maupun orang kota, jarang yang berani memasuki kantor tempat otoritas yang lebih tinggi (pemerintah atau kantor perusahaan, pengadilan) tanpa ditemani, atau membawa surat rekomendasi dari pejabat atau orang besar yang menjamin mereka.

Bahasa yang dipakai dalam konstitusi Indonesia menegaskan hierarki: pasal-pasal nya tidak dipusatkan pada hak warga negara tetapi pada tugas negara (politisi dan pejabat) untuk memberikan manfaat seperti perdamaian, kemakmuran, dan pembangunan. Ini adalah model negara yang ditata seperti ke-

33. Makdisi, “Architecture of Erasure,” 555.

34. Hak warga negara sehari-hari dibahas dalam Berenschot, Nordholt, dan Bakker, *Introduction to Citizenship and Democratization in Southeast Asia*.

luarga di mana orang tua memiliki kewajiban tetapi anak-anak memiliki sedikit hak.<sup>35</sup> Tatanan semacam ini memperlakukan warga negara sebagai anak-anak kecil; dan menempatkan anak-anak yang kehilangan perlindungan pada posisi sangat rentan. Di bawah pendudukan perusahaan, pejabat, politisi, dan pemimpin desa semua menjadi pendukung perusahaan dan "orang kecil" terpaksa berjuang sendiri.

Kedua, berteori bahwa kehadiran perusahaan sebagai bala pendudukan membantu menjelaskan posisi sosial baru, subjektivitas, dan evaluasi moral yang muncul ketika orang dipaksa menjalani suatu bentuk kehidupan—hidup bersama raksasa—yang tidak dapat mereka kendalikan. Sudah diketahui bagaimana di wilayah pendudukan militer, pejabat pemerintah dan pemimpin desa bekerja sama dengan tentara pendudukan; rakyat biasa menjadi pendukung; orang-orang yang semula berniat mengusir penjajah akhirnya hidup dalam mode koeksistensi dengan penjajahnya; dan pemberontakan menjadi gerakan dengan tujuan terbatas. Evaluasi moral berubah bentuk. Mencuri pihak penjajah menjadi barang lumrah. “Senjata kaum lemah” seperti yang diidentifikasi James Scott dapat tampil dalam berbagai bentuk, namun di sini juga berkembang praktik tetangga mencuri tetangga diterima dengan alasan setiap orang perlu makan. Pendudukan membuat evaluasi moral atas cara mendapatkan uang menjadi ranah kontestasi, di mana batas antara tindakan yang sah dan tidak sah menjadi kabur, di mana kesetiaan mudah dijual dan mudah dibeli.<sup>36</sup> Penelitian kami di Tanjung menunjukkan bahwa pendudukan militer dan pendudukan per-

35. Mengenai negara kekeluargaan lihat Bouchier, *Illiberal Democracy in Indonesia*.  
 36. Mengenai evaluasi moral lihat Ferguson, *Give a Man a Fish*. Mengenai ekonomi moral dan pemberontakan petani, lihat J. Scott, *Moral Economy* dan *Weapons of the Weak*. Mengenai Illicit versus illegal, lihat Roitman, “Ethics of Illegality”; Harriss-White dan Michelutti, *Introduction to The Wild East*; Gupta, “Blurred Boundaries”; Appel, *Licit Life of Capitalism*.

usaha beroperasi di jalur yang sama. Buruh dan warga desa di kawasan perkebunan tidak melakukan mobilisasi untuk membubarkan perusahaan; elite lokal berkolaborasi dengan perusahaan dan pada saat yang sama mencuri darinya; dan orang-orang biasa mengambil apa saja yang bisa mereka ambil. Rakasa perusahaan berdiri kokoh namun ia diserbu pencuri dari segala sisi.

Ketiga, mengonsepan perusahaan sebagai bala pendudukan mengungkap mandat ganda pemerintahan kolonial dan pemerintahan militer. Bala pendudukan biasa menampilkan diri mereka sebagai kekuatan baik hati yang bermaksud memperbaiki kehidupan rakyat dan menyatakan penyitaan aset serta mendapat untung sebagai perkara nomor dua. Sebagaimana bala pendudukan lainnya, perusahaan perkebunan memberikan janji kemakmuran dan menyediakan fasilitas modern yang membawa rakyat pada cara hidup yang lebih baik. Seperti teknologi kolonial yang diteliti David Scott, pendudukan oleh perusahaan “terutama berkaitan dengan usaha untuk melumpuhkan bentuk-bentuk kehidupan lama dengan secara sistematis meruntuhkan kondisi mereka serta membangun kondisi baru yang memungkinkan—memang, untuk mewajibkan—keberadaan bentuk-bentuk kehidupan baru.”<sup>37</sup> Dalam istilah Talal Asad dan David Scott, rakyat di kawasan perkebunan Tanjung adalah “konskrip modernitas”: cara-cara lama mereka untuk mengatur lanskap dan mata pencaharian, keluarga dan komunitas dinonaktifkan sepenuhnya, dan kemudian mereka diwajibkan mengembangkan cara-cara kehidupan baru mengikuti kondisi yang dipaksakan oleh bala pendudukan.<sup>38</sup>

Untuk menelusuri kontur pembentukan subjek di bawah pendudukan perusahaan, kami mempelajari munculnya cita-

37. D. Scott, “Colonial Governmentality,” 193.

38. D. Scott, *Conscripts of Modernity*; Asad, “Conscripts of Western Civilization.”

cita, disposisi, dan lembaga baru. Kami memperhatikan masa depan yang dibayangkan oleh para pekerja dan rakyat desa di kawasan perkebunan untuk anak cucu mendatang, serta jalur mana yang mereka pandang terbuka atau tertutup untuk mencapainya. Kami menanyakan apa yang mereka anggap sebagai jatah wajib yang harus mereka terima dari perkebunan— jatah sebagai pemilik tanah asli, pekerja, atau tetangga perkebunan.<sup>39</sup> Tidak mengherankan, jika kemudian kami menemukan bahwa manfaat modernitas yang dijanjikan tidak terdistribusi secara merata. Beberapa orang menikmati paket lengkap fasilitas modern sementara yang lain kehilangan akses ke sumber nafkah dasar. Orang-orang yang tidak masuk daftar penerima keuntungan dari perkebunan tidak begitu saja mau menerima penempatan mereka ke dalam ruang tunggu permanen, atau ke ruang waktu aneh yang diidentifikasi oleh Elizabeth Povinelli di mana persoalan hari ini akan dianggap telah dibereskan “dari sudut pandang kepentingan orang terakhir di kemudian hari.”<sup>40</sup> Namun penolakan mereka terhadap degradasi ini bukanlah tindakan heroik. Seperti yang diamati Povinelli, bagi kaum yang sudah remuk redam, mampu bertahan hidup saja sudah merupakan pencapaian luar biasa. Suara dan wajah mereka mungkin hilang dari wacana publik tetapi mereka tetap hidup, tetap bertahan; karenanya bentuk “hidup bersama raksasa” yang mereka alami merupakan bagian penting dari analisis kami.

### **Puing-Puing Imperialisme**

Puing-puing imperialisme adalah pilar teori kedua kami tentang kehidupan di perkebunan. Puing-puing imperialisme adalah

39. Mengenai konsep “jatah wajib” (“*rightful share*”), lihat Ferguson, *Give a Man a Fish*.

40. Lihat Povinelli, *Economics of Abandonment*, 77.

label yang dipasang Ann Stoler untuk “koreng yang tersisa” dari teknologi politik kolonial.<sup>41</sup> Di balik mandat ganda yang diberikan kepada perusahaan perkebunan, dulu maupun sekarang, terdapat proposisi rasial yang telah tertanam dalam hukum dan wacana politik Indonesia sejak zaman kolonial: perusahaan harus membuat lahan menjadi lahan yang produktif karena para petani Indonesia tidak mampu melakukannya. Rasialisme, yang didefinisikan oleh Cedric Robinson sebagai “legitimasi dan penguatan organisasi sosial sebagai suatu yang alami dengan komponen ‘ras’ sebagai acuannya,” tidak menjadi hilang dengan perginya penguasa kulit putih Indonesia.<sup>42</sup> Rasialisme ini kemudian dilingkarkan pada kekuasaan Indonesia merdeka yang ternyata kuat bau feodalismenya, diakarkan dalam peraturan hukum, dan sehari-hari terus dipraktikkan dalam perlakuan “orang-orang besar” terhadap bangsa sendiri yang mereka anggap sebagai kaum rendahan.

Robinson mengajukan teori “kapitalisme rasial” sebagai format yang dibangun di atas rasialisme dan menghasilkan pemisahan sosial serupa ras saat format tersebut dioperasikan untuk menggerakkan lahan dan tenaga kerja guna menghasilkan laba. Dia memperhatikan “betapa besar pengeluaran energi psikis dan intelektual” yang diperlukan untuk menciptakan sosok “Slava”, “orang Irlandia”, dan “Negro” sebagai manusia yang secara alami dianggap cocok untuk kerja kasar, dan untuk menghasilkan “Irlandia” dan “Afrika” sebagai ruang liar yang terbuka untuk dirompak, wawasan yang memiliki daya gerak global.<sup>43</sup> Di Asia Tenggara masa kolonial, produksi ruang kosong yang empuk untuk pendudukan perusahaan dan pemilihan manusia-manusia yang dianggap cocok untuk kerja kasar

41. Stoler, “Imperial Debris”; lihat juga Stoler, *Duress*.

42. Robinson, *Black Marxism*, 2.

43. Robinson, *Black Marxism*, 4.

berpusat pada “mitos pribumi malas” yang telah dibahas oleh Syed Hussein Alatas.<sup>44</sup> Menurut mitos ini, penduduk asli di mana pun adalah kaum tani yang tidak cakap dan tidak bisa bekerja. Para pejabat kolonial menggunakan asesmen rasial ini untuk membenarkan pembukaan perkebunan dan mendatangkan kuli impor sebagai tenaga kerjanya.

Mitos pribumi malas terus menimbulkan kesenjangan sosial yang tajam di kawasan perkebunan Indonesia saat ini. Pejabat pemerintah, manajer perkebunan, dan karyawan yang kami temui di Tanjung sangat yakin bahwa mereka berbeda dan lebih unggul dari penduduk setempat. Hingga taraf tertentu pendidikan dan konsep keragaman budaya dapat mengurangi kesenjangan sosial, tetapi koreng warisan kolonial ini tetap saja susah hilang.<sup>45</sup> Di Indonesia biasanya orang tidak menyebut kesenjangan sosial yang sangat hierarkis ini sebagai kesenjangan ras, melainkan kesenjangan feodal atau kolonial. Sebutan ini mengakui adanya perbedaan sebagai fakta sosial, tetapi juga mengisyaratkan bahwa di Indonesia modern di mana menurut konstitusi semua warga negara sama kedudukannya, perbedaan seperti itu tidak sepenuhnya sah. Di luar kebiasaan sehari-hari, koreng warisan teknologi rasial kolonial ini mengakar paling dalam di bidang hukum pertanahan dan penilaian produktivitas.

### *Hukum Tanah*

Seperti yang telah ditunjukkan Brenna Bhandar, pembedaan rasial (atau yang mirip ras) merupakan bagian dari rezim agraria kolonial dan kontemporer di mana hubungan antara jenis ma-

44. Alatas, *Myth of the Lazy Native*.

45. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan resmi bangsa. Penghubungan antara budaya dan suku merupakan bahan pembicaraan sehari-hari di Indonesia. Antropologi di Indonesia dipengaruhi oleh aliran “budaya dan kepribadian” melalui Koentjaraningrat, yang belajar di Amerika Serikat pada 1950-an. Lihat Koentjaraningrat, *Masyarakat Terasing di Indonesia*.

nesia, jenis penggunaan tanah, dan inferioritas hak milik adat saling bertaut.<sup>46</sup> Di Indonesia rantai penalarannya seperti ini: Badan Pertanahan Nasional memberikan konsesi kepada perusahaan perkebunan dengan alasan bahwa mereka dapat memanfaatkan tanah secara efisien; secara implisit pemberian itu menyatakan bahwa pemilik tanah adat tidak mampu menggunakan tanah secara efisien; oleh karenanya hak tanah adat mereka dianggap tidak memenuhi syarat untuk diakui sebagai hak milik penuh; produktivitas mereka yang rendah dan hak kepemilikan yang tidak lengkap dijadikan penegas bahwa mereka adalah manusia bernilai rendah; sebagai manusia bernilai rendah, mereka tidak dapat diharapkan untuk menggunakan tanah secara efisien, dan karenanya secara sah mereka dapat ditelantarkan oleh perusahaan.<sup>47</sup>

Dengan mengacu langsung pada peraturan agraria kolonial tahun 1870, UU Agraria 1960 (yang masih berlaku) memperlakukan sebagian besar wilayah negeri sebagai tanah negara yang dapat dikonsesikan kepada perusahaan perkebunan, pertambangan, dan penebangan hutan. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan yang sangat lemah terhadap hak tanah adat, yang hanya dapat diakui jika tidak mengganggu jalannya pembangunan ekonomi nasional. Kampanye gencar para aktivis telah menekan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanahan untuk membuat prosedur pengakuan resmi hak tanah adat, tetapi persyaratan yang diberikan pemerintah sulit dipenuhi dan membutuhkan fasilitasi LSM selama puluhan tahun dan dana yang besar. Pada 2020 hak tersebut hanya diberikan pada sejumlah kecil dari 40 juta hektar lahan hutan yang diklaim negara yang menurut para aktivis harus dikembalikan

46. Bhandar, *Colonial Lives of Property*.

47. Mengenai narasi keterbelakangan penduduk asli sebagai pembenaran perluasan perkebunan, lihat McCarthy dan Cramb, "Policy Narratives, Landholder Engagement"; Dove, *Banana Tree at the Gate*.

ke yurisdiksi masyarakat adat.<sup>48</sup>

Penduduk desa yang tidak mengaku diri sebagai masyarakat adat juga terkena perampasan tanah. Sekitar tahun 2015 sertifikat tanah individu resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional hanya mencakup 20 persen dari bidang lahan pertanian pedesaan; selebihnya, penguasaan tetap didasarkan pada adat atau kebiasaan setempat.<sup>49</sup> Penduduk desa punya pemahaman yang jelas tentang apa yang menjadi milik mereka; mereka memiliki mekanisme sehari-hari untuk menyelesaikan perselisihan internal; biasa juga mereka mendapat pengakuan negara yang tidak terlalu jelas atas hak tanah misalnya melalui surat pajak, tetapi pengakuan tersebut tidak cukup kuat untuk mencegah perusahaan pemegang konsesi menduduki tanah mereka.<sup>50</sup> Pejabat mengakui bahwa pembebasan tanah perusahaan sering ditangani secara tidak benar: persetujuan dipalsukan atau dipaksakan, kompensasi tidak memadai, harga dimanipulasi, dan perusahaan membuat janji yang tidak mereka tepati. Tetapi mereka tidak mengakui dasar kolonial dari hukum tanah yang mengabaikan hak tanah adat dan menjadikan perusahaan sebagai wahana pendudukan. Seperti yang ditunjukkan oleh Christian Lund, perusahaan melakukan “akumulasi primitif” yang secara hukum tuntas pada 1870; namun baru saat bulldoser mereka menggusur rumah dan lahan petani perampasan tersebut benar-benar menjadi nyata. “Pencurian ini,”

48. Para aktivis menggunakan istilah masyarakat adat untuk kategori global masyarakat asli, *indigenous people*, meskipun perihal siapa orang asli di Indonesia merupakan masalah yang diperdebatkan. Lihat Li, “Articulating Indigenous Identity in Indonesia” dan “Epilogue”; Willem van der Muur et al., “Changing Indigeneity Politics in Indonesia.”
49. Mengenai rezim agraria di Indonesia, lihat McCarthy dan Robinson, *Land and Development in Indonesia*. On the limited coverage of land titles, lihat World Bank, *Towards Indonesian Land Reforms*, xxxvii.
50. Wilayah kelabu dan pengakuan parsial atas hak milik dibahas dalam Sikor dan Lund, “Access and Property”; Lund, *Nine-Tenths of the Law*.

tulis Lund, “sudah diputihkan pemerintah terlebih dahulu.”<sup>51</sup>

### *Produktivitas*

Penilaian resmi tentang siapa petani produktif dan siapa yang tidak di Indonesia, selalu penuh dengan puing-puing imperialisme. Para pejabat kolonial mengakui keterampilan budidaya padi sawah berteras petani Jawa dan Bali, tetapi mereka tidak menghargai peladang yang mereka anggap boros lahan. Penilaian mereka merasuk ke dalam program transmigrasi, kolonisasi dalam negeri yang dimulai sejak 1920-an ketika pemerintah kolonial mengirim petani yang kekurangan lahan dari pulau-pulau padat penduduk untuk menetap di pulau-pulau lain di mana tanah dianggap kurang dimanfaatkan. Pasca kemerdekaan, transmigrasi yang disponsori negara terus berlanjut dan kebijakan baru menambah tujuan distribusi penduduk dengan pelaksanaan mandat eksplisit pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi.<sup>52</sup> Transmigrasi yang dikirim ke daerah terpencil ditugaskan memberi contoh tatacara pertanian modern untuk ditiru oleh petani setempat yang dianggap terbelakang. Karenanya tidaklah mengherankan, ketika para transmigran tiba di Tanjung, orang Melayu dan Dayak setempat menganggap mereka sebagai bala penduduk: mereka menduduki tanah adat dan kehadiran mereka, dengan keterampilan bertani yang dianggap unggul, menjadi perwujudan gagasan merendahkan yang menganggap penduduk asli Kalimantan sebagai masyarakat tertinggal.

Dalam perkara pasokan komoditi pasar global, penguasa kolonial dengan enteng menganggap sistem produksi petani setempat tidak efisien. Namun para sejarawan telah menunjuk-

51. Lund, *Nine-Tenths of the Law*, 14.

52. Brasil dan Vietnam memiliki program kolonisasi dalam negeri serupa guna mengirim penduduk ke daerah “*frontier*”; lihat De Koninck, “Geopolitics of Land”; Slater, “Justice for Whom?”

kan bahwa selama tiga abad terakhir petani kecil Indonesia sangat mahir dan antusias dalam budidaya komoditi pasar global. Seperti diungkap Clifford Geertz dan ahli lainnya, kebijakan agraria kolonial tidak dirancang untuk menarik penduduk desa yang enggan bergabung dengan ekonomi pasar; tujuan kebijakan mereka adalah untuk mengurung penduduk desa pada pencarian subsisten dan melindungi perusahaan perkebunan yang didukung negara dari gangguan pesaing lokal.<sup>53</sup> Sejak 1700, para petani di Jawa dengan penuh semangat menanam kopi untuk mengambil manfaat dari peluang pasar ekspor baru. Mereka berhasil hingga kemudian produksi mereka ditekan oleh VOC (1602-1799) yang menerapkan monopoli perdagangan kopi dan menetapkan harga beli yang sangat rendah sehingga petani membakar kebun kopi mereka dengan marah. Sejak itu mereka dipaksa mengikuti kuota dagang kopi dan, kemudian, gula. Akan tetapi setiap kali mereka dibayar dengan harga pasar yang wajar, produktivitas mereka naik berlipat ganda.<sup>54</sup>

Pada 1870-an ketika pemerintah kolonial mulai memberikan konsesi perkebunan kepada pemilik modal asing, lagi-lagi dengan alasan produktivitas, para pekebun menghadapi kegelisahan. Di Sumatra, para pekebun melobi pejabat kolonial agar melarang penduduk desa dan mantan kuli perkebunan memproduksi tembakau karena takut kalah bersaing. Di Jawa, para pekebun bersikeras agar para petani tidak didorong menanam teh. Pada 1920-an para petani di Sumatra dan Kalimantan dengan penuh semangat mengadopsi budidaya karet sehingga perkebunan karet yang kurang efisien menjadi bangkrut. Selama

53. Geertz, *Agricultural Involution*. Lihat juga Li, "Involution's Dynamic Others," "Price of Un/Freedom," dan sumber-sumber dalam tulisan tersebut. Mengenai kecenderungan pasar di pedesaan Asia Tenggara secara lebih luas, periksa Hall, "Rethinking Primitive Accumulation" dan "Land Grabs, Land Control."

54. Mengenai penggunaan kuota sebagai alat pemaksa dalam budidaya kopi, lihat Breman, *Mobilizing Labour*; Li, Pelletier, dan Sangadji, "Unfree Labour and Extractive Regimes."

Depresi 1930-an, produksi karet petani sengaja ditekan, kali ini untuk mempertahankan harga pasar bagi produk perkebunan yang susah payah bertahan hidup.<sup>55</sup> Seperti Michael Dove tegaskan sejak lama, hak istimewa dan monopoli yang diberikan kepada perusahaan sawit kontemporer dengan mengorbankan petani kecil yang antusias dan produktif adalah lanjutan dari motif kolonial tadi.<sup>56</sup> Perusahaan perkebunan bukanlah produsen yang sangat efisien dan juga tidak membawa pembangunan ke daerah terpencil, tetapi mereka adalah teknologi yang efektif untuk menghasilkan dan menyedot aliran pendapatan dan laba, topik yang akan kita bicarakan lebih lanjut.

### **Rezim-Rezim Ekstraktif**

Teori kami tentang rezim-rezim ekstraktif sebagai elemen pokok pembentuk kehidupan perkebunan berangkat dari pandangan bahwa rezim ekstraktif banyak bentuknya. Pertama, perkebunan digerakkan untuk mengekstrak produk pasar global dari faktor-faktor alam seperti tanah, benih, air, dan tenaga kerja manusia. Kedua, mencetak laba bagi perusahaan, pemegang saham, dan bank-bank yang mengongkosi mereka. Ketiga, mendatangkan devisa dan penerimaan bagi negara. Keempat, yang sangat menonjol di Indonesia saat ini, adalah ekstraksi pendapatan abu-abu dan gelap, yang disalurkan ke berbagai pihak di dalam dan jauh di luar kawasan perkebunan. Keempat gerak ini bekerja bareng dalam konfigurasi yang bisa beragam. Di sini kami akan menguraikan kontur rezim ekstraktif yang dibentuk oleh sejarah perkebunan Indonesia dan kekejaman peristiwa 1965-1966, praktik ekstraksi ilegal kontemporer dan tatanan impunitas yang melingkupinya, dan potensi laba gemuk

55. Li, "Price of Un/Freedom."

56. Dove, *Banana Tree at the Gate*.

yang menarik minat perusahaan transnasional dan nasional ke dalam produksi sawit.

### *Sejarah Perkebunan*

Dalam periode liberal Indonesia, mulai 1870, pemerintah kolonial memberikan konsesi kepada perusahaan perkebunan agar mereka dapat mendatangkan pendapatan guna mengongkosi administrasi kolonial dan menghasilkan keuntungan bagi para pemilik saham di Belanda. Namun seperti yang diamati sejarawan kolonial Furnivall, pendapatan yang diterima pemerintah ternyata disedot oleh biaya infrastruktur untuk mendukung perusahaan. Hasilnya adalah para pemegang saham menikmati untung besar, tetapi kas negara kosong melompong, dan tidak pernah ada dana untuk pembangunan bagi kaum pribumi—masalah yang hingga kini tetap berlanjut.<sup>57</sup> Perkebunan kolonial Jawa menghasilkan gula, kopi, dan teh. Totalnya mencakup 1,3 juta hektar pada 1920-an dan merekrut pekerja bebas (bukan kuli kontrak) dari daerah sekitarnya.<sup>58</sup> Di Sumatra pada 1930 sabuk perkebunan mencakup hampir satu juta hektar di wilayah yang nyaris berimpitan. Tanaman utama yang dibudidayakan adalah tembakau dan karet, yang diperkenalkan pada sekitar 1910-an.

Hukum perburuhan, yang hadir dalam wujud Ordonansi Kuli, dibuat untuk mengikat kuli melalui kontrak, yang kemudian diperkuat dengan menjerat mereka dalam utang yang tak berkesudahan dan penerapan hukuman fisik di tempat. Awalnya para kuli direkrut dari Cina dan kemudian dari Jawa. Para administratur dan sinder kebun diizinkan pemerintah untuk menjatuhkan hukuman fisik, didukung oleh hukum pidana yang mengklasifikasikan kerja lambat atau upaya melarikan di-

57. Furnivall, *Netherlands India*, 216, 223–225.

58. Pemerintah Hindia Belanda, *Landbouwatlas Van Java En Madoera*.

ri sebagai tindak kejahatan. Hukum kolonial mengizinkan perusahaan perkebunan membuat aturan mereka sendiri dan melindunginya dari campur tangan pihak luar dalam “urusan internal” mereka. Pejabat kolonial, politisi Belanda, dan kritikus lain yang prihatin dengan nasib para kuli atau petani yang kehabisan lahan, berjuang menekan perkebunan yang memegang kedaulatan pemberian pemerintah kolonial sebagai mesin produksi.<sup>59</sup>

Selama beberapa waktu dukungan negara untuk perusahaan perkebunan sempat goyah. Selama pendudukan Jepang pada 1942–1945, para pekebun Belanda dimasukkan interniran, dan para pekerja menanam tanaman pangan serta membangun rumah di lahan konsesi. Pekebun yang mencoba kembali selama dan setelah perang kemerdekaan (1946–1949) menghadapi perlawanan keras para pekerja yang sudah menjadi petani ini. Sementara Sukarno, presiden republik yang baru lahir, melihat perkebunan milik asing sebagai kendaraan untuk melanjutkan ekstraksi (neo)kolonial. Namun di bawah pemerintahannya, perjuangan atas tanah perkebunan dan tuntutan pekerja perkebunan untuk upah dan kondisi yang lebih baik tumbuh semakin kuat. Sebagian diorganisir oleh serikat yang terkait dengan Partai Komunis, yaitu serikat pekerja perkebunan Sarbupri dan Barisan Tani Indonesia.<sup>60</sup> Situasi berubah secara radikal pada 1957 ketika Sukarno menasionalisasi perkebunan milik asing, yang bertujuan untuk menegaskan kembali kedaulatan nasional dan menghentikan penyedotan keluar kekayaan Indonesia. Sukarno membayangkan perusahaan perkebunan milik negara yang diawasi oleh Kementerian Pertanian akan

59. Lihat Pelzer, *Planter and Peasant*; Stoler, *Capitalism and Confrontation*; Breman, *Taming the Coolie Beast*; Houben, “Profit versus Ethics.”

60. Lihat B. White, “Remembering the Indonesian Peasants’ Front”; Stoler, *Capitalism and Confrontation*. Dilaporkan pada periode 1951-1955 terjadi 553 pemogokan di perkebunan milik asing; lihat de Groot Heupner, “Palm Oil Plantation,” 12.

mampu memanfaatkan kekuatan produktif perusahaan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Namun karena ada urgensi untuk memulihkan produksi perkebunan guna menghasilkan devisa, dan sebagai taktik untuk memenuhi tuntutan ekonomi tentara, Sukarno menempatkan perkebunan yang dinasionalisasi di bawah manajemen militer sementara. Sukarno kalah oleh tentara, yang menjadikan perkebunan menjadi sumber dana operasi militer dan pengayaan pribadi para perwira di bawah. Tatanan impunitas yang mereka pasang untuk diri mereka pada saat itu adalah prakondisi dan insentif yang mendukung ekspansi kehadiran perusahaan perkebunan masa kini.<sup>61</sup>

Sejak 1957, para perwira militer main mata dengan birokrat, politisi, dan pengusaha untuk memperkuat kendali mereka atas perkebunan yang dinasionalisasi, mengangkut apa saja yang mereka inginkan, dan menyerang atau mengancam siapa saja yang berseberangan dengan mereka. Kongkalikong antara pejabat-pengusaha mengonsolidasikan kekuatan pada 1965-1966 ketika tentara dan pendukungnya menggulingkan Sukarno dan membantai sekitar setengah juta anggota partai komunis dan serikat buruh. Tindakan ini secara efektif memadamkan kekuatan tandingan yang paling signifikan di sektor perkebunan dan di lingkungan yang lebih luas. Para intelektual dipenjara atau dibungkam dan sejak saat itu, tulis sejarawan Geoffrey Robinson, “seluruh tradisi pemikiran, penulisan, dan tindakan politik kiri” yang telah membentuk budaya dan debat publik Indonesia sejak 1920-an “dihancurkan dan dinyatakan tidak sah.”<sup>62</sup>

Sejak 1966 tidak ada lagi serikat buruh, organisasi petani,

61. Mengenai penguasaan militer di perkebunan pada 1950-an, lihat Mackie, “Indonesia’s Government Estates.”

62. G. B. Robinson, *Killing Season*, 301. Geoffrey B. Robinson mencatat diperkirakan jumlah orang yang tewas berkisar dari 78.500 hingga 3 juta, namun di kalangan para peneliti angka 500.000 diterima luas (315n1).

atau partai politik yang mampu mengontrol kerjasama militer-pejabat-pengusaha yang terus beroperasi di dalam maupun di luar hukum.<sup>63</sup> Mereka bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan transnasional yang tengah mencari akses untuk menanggung sumber daya Indonesia. Setahun setelah pembasmian anggota Partai Komunis dan dimulainya rezim Orde Baru Jenderal Suharto, pemerintah memulihkan hubungan dengan perusahaan asing dengan menyetujui pembayaran kompensasi untuk perusahaan asing yang dinasionalisasi dan menyatakan Indonesia terbuka bagi investasi asing baru (Gambar I.1). Bank Dunia dan IMF langsung menawarkan dukungan keuangan kepada pemerintah untuk membangun infrastruktur yang diperlukan perusahaan, kebijakan yang memperluas mandat perusahaan dengan upaya penyediaan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi nasional sebagai justifikasi.<sup>64</sup>

Pada 1980-an pemerintah Indonesia mengadopsi kebijakan yang semakin neoliberal untuk menarik investasi asing dan domestik di bidang perkebunan. Langkah ini melesat makin jauh selama krisis keuangan Asia 1997–1998 ketika langkah penyelamatan IMF memaksa Suharto dan penerusnya membuka lebih banyak sektor ekonomi Indonesia bagi investasi asing.<sup>65</sup> Undang-undang yang mengatur usaha pertambangan, perkebunan, dan tenaga kerja direvisi untuk memberi kemudahan bagi perusahaan. IMF dan para donor juga mendesak pemerintah untuk mendesentralisasikan kekuasaan ke tingkat kabupaten di mana politisi yang dipilih melalui pemilu seharusnya le-

63. Lihat B. R. O'G. Anderson, "Indonesian Nationalism Today"; Eickhoff, van Klinken, dan Robinson, "1965 Today"; Cribb, "System of Exemptions"; G. B. Robinson, *Killing Season*; Stoler, *Capitalism and Confrontation*; Hadiz, "Capitalism, Primitive Accumulation"; Hadiz dan Robison, "Political Economy of Oligarchy"; Aspinall dan Gerry van Klinken, *State and Illegality in Indonesia*.

64. Lihat N. J. White, "Surviving Sukarno"; Toussaint, *World Bank and the IMF*.

65. Bullard, Bello, dan Mallhotra, "Taming the Tigers."

### Gambar P.1 Buruh Perkebunan Karet, 1967



Dalam arsip dokumenter tahun 1967, seorang reporter NBC mewawancarai seorang akademisi Bali yang dengan jujur menyampaikan pembenaran bagi pembunuhan kaum komunis, kemudian ia berpindah langsung ke rekaman perkebunan karet Goodyear yang kembali menjalankan usaha dengan tenaga kerja tahanan mantan anggota serikat buruh, yang bekerja di kebun di bawah todongan senjata. Dalam kata-kata si reporter, “Seburuk-buruknya, ada satu fakta positif di sini: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, dan Orde Baru ingin itu sumber daya tersebut dieksploitasi.”  
*Sumber: “Indonesia 1967: American reporter for NBC speaks to a genocidaire in Bali.”* <https://www.youtube.com/watch?v=D142TICzCik>.

---

bih bertanggung jawab kepada rakyat.<sup>66</sup> Hasilnya adalah merebaknya perampasan lahan dan hutan dan “replikasi tanpa batas atas predasi oleh kerjasama negara–swasta” pada semua skala kehidupan.<sup>67</sup>

66. Silver, “Do the Donors Have It Right?”

67. Obidzinski, “From New Order.” Investasi untuk membangkitkan sektor manufaktur tidak banyak terjadi; lihat Wie, “Impact of the Economic Crisis.”

*Lingkungan Politik*

Ciri mendasar rezim ekstraktif yang telah mengakar di Indonesia sejak 1966 adalah adanya kemampuan pejabat pemerintah, politisi, dan kroni swasta mereka untuk mengeruk apa pun semaunya karena mereka bisa. Kekebalan hukum mereka “mapan” dalam arti sudah berakar kemana-mana, dilembagakan, dan diatur secara hierarkis: semakin tinggi jabatannya diharapkan semakin besar daya keruknya. Tatanan impunitas mirip dengan yang dijelaskan Achille Mbembe di Afrika pascakolonial, yang didasarkan pada hak istimewa, tirani kecil-kecilan, pemangsaan, “privatisasi hak publik,” dan “kesewenangan rutin.”<sup>68</sup> Dalam kategori ahli Asia Tenggara Jacqui Baker dan Sarah Milne, Indonesia termasuk dalam daftar “negara uang kotor” di mana pejabat dan politisi panen penghasilan dari perusahaan, kroni, dan rakyat biasa dengan memungut rente, memalak, dan memeras, dan mendistribusikan sebagian dari panen haram ini untuk menjinakkan lawan dan memperbanyak anak buah.<sup>69</sup> Karut marut ini bukanlah gambar “negara gagal”, melainkan negara yang dijalankan dengan mengikuti aturan main tertentu. Negara seperti ini berkembang dalam ketidakjelasan, didasarkan pada undang-undang yang saling bertentangan, rencana tata ruang yang tumpang tindih, kerahasiaan dan persaingan antar departemen, dan akuntabilitas publik yang minimal. Kitab-kitab besar statistik yang diterbitkan negara tidak menghasilkan keterbacaan; tetapi “domain yang tidak dapat dihitung” karena tidak ada yang tahu persis apa yang diwakili oleh angka-angka dalam laporan tersebut.<sup>70</sup> Karenanya bukanlah barang mengherankan bahwa birokrat dan politisi mendapat kepercayaan publik yang sangat rendah.<sup>71</sup>

68. Mbembe, *On the Postcolony*.

69. Baker dan Milne, “Dirty Money States.”

70. J. Scott, *Seeing Like a State*; Mitchell, *Rule of Experts*, 114–119.

71. Mengenai perusakan prinsip-prinsip pelayanan publik dan penciptaan politisi

Praktik pemungutan rente—upaya mendapatkan kekayaan melalui penggunaan kekuasaan—berjalan sedemikian luas di sektor publik Indonesia sehingga perusahaan maupun perorangan sukar untuk menghindarinya. Penelitian para ahli politik, antropolog, dan jurnalis telah mengungkap hubungan erat antara pejabat, politisi dan swasta di semua dinas pemerintahan dan bidang industri, dan meluasnya privatisasi jabatan publik. Pejabat dan politisi mengurutkan kementerian berdasar kapasitasnya menelurkan penghasilan pribadi: pekerjaan umum, kehutanan, dan peradilan terkenal basah. Para pejabat dan politisi membayar suap untuk mendapatkan posisi, dengan jumlah yang disesuaikan dengan pendapatan yang diharapkan bakal dipetik dari posisi tersebut.<sup>72</sup> Badan Usaha Milik Negara—perkebunan negara masuk di sini—benar-benar menjadi pohon duit bagi direktur dan manajer yang menjalankannya serta bagi para politisi dan kroni yang memegang jalur untuk menyadap anggarannya.<sup>73</sup>

Dalam wacana sehari-hari pemungutan rente ini dihaluskan dengan istilah potongan, sunat, pangkasan, pengumpulan dana, bantuan atau sumbangan. Sebutan umum untuk transaksi kurang ajar ini adalah tahu sama tahu, “Biar urusan ruwet jadi gampang, kita sama-sama tahu bagaimana cara kerja sistemnya.” Sebuah istilah populer lain untuk pemerasan sehari-hari ini adalah “sistem mafia”, yang dalam konteks Indonesia

mengambang tanpa konstituen oleh Orde Baru, lihat Bourchier, *Illiberal Democracy*, 242; G. B. Robinson, *Killing Season*; Dick dan Mulholland, “Politics of Corruption in Indonesia.”

72. Praktik-praktik birokrasi-politis predasi, oligarki, dan illegalitas dibahas dengan terang dalam dua buku kumpulan: Aspinall dan van Klinken, *State and Illegality*, serta van Klinken dan Barker, *State of Authority*. Lihat juga Hadiz dan Robison, “Political Economy of Oligarchy.” Mengenai perbedaan antara *pays légal* dan *pays réel*, lihat Jean-Bayart dan Ellis, “Africa in the World.” Mengenai kolusi perusahaan dan kroni-kroninya di India, lihat Harriss-White dan Michelutti, pendahuluan untuk *The Wild East*; di Pakistan, lihat Akhtar, *Politics of Common Sense*.
73. Apriyanti dan Kristiansen, “Logics of Political Business.”

tidak mengunjuk pada kegiatan kejahatan keluarga atau geng tukang pukul melainkan penggunaan jalur sempit dalam struktur birokrasi untuk memasang gerbang palak guna memalak siapa saja yang mau lewat. Biasa juga gerbang palak ini dijaga oleh preman, tetapi disini penggunaan kekerasan bukan modus operandi utama; pemalakan diintegrasikan dengan sistem, dan mereka yang menolak membayar tidak bisa menempuh jalur birokrasi lebih lanjut. Betapapun kecilnya, gerbang palak ini adalah posisi monopoli; maka ada mafia sekolah yang beroperasi dengan memalak orang tua supaya anak-anaknya dapat mengikuti ujian, ada mafia tanah yang mengutip uang palak setiap kali diperlukan tanda tangan untuk transaksi tanah, dst.<sup>74</sup> Praktik mafia semacam ini biasanya tidak disebut korupsi, yang di Indonesia mengacu pada tindakan pejabat “menyalahgunakan uang negara”. Namun demikian korupsi, bila diungkap, bisa memberi peluang kepada mafia peradilan (polisi, pejabat pengadilan, hakim) untuk memalak tersangka agar kasusnya ditangani secara “kekeluargaan” atau lewat “jalan damai”, yang bisa menghindarkan si tersangka dari rasa malu di hadapan umum, serta menghemat biaya dan proses hukum yang panjang.<sup>75</sup>

Seperti yang akan kami tunjukkan dalam analisis etnografi kami praktik mafia merajalela di kawasan perkebunan Tanjung; demikian pula praktik tersebut merupakan bagian integral dari kemampuan menduduki tanah desa oleh dua perusahaan yang kami pelajari. Untuk menjalankan mandat dan hak istimewa yang diberikan negara, semua perusahaan perkebunan membutuhkan dukungan politisi dan birokrat yang berhak tanda ta-

74. Mengenai mafia sebagai istilah emik, lihat Aspinall dan van Klinken, “State and Illegality,” 26–27; “Amien Rais Sebut Indonesia Dikuasai Mafia, TKN: Dia Hanya Suudzon.” Tempo.co, 29 Januari 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1170129/amien-rais-sebut-indonesia-dikuasai-mafia-tnk-dia-hanya-suudzon/full&view=ok>. Untuk penggunaan serupa istilah mafia di India, lihat Harriss-White dan Michelutti, pendahuluan untuk *The Wild East*.

75. Butt dan Lindsey, “Judicial Mafia.”

ngan, mengeluarkan izin usaha, dan punya kapasitas menyelesaikan persoalan. Sejak tahun 2000, ketika tanggung jawab untuk mengeluarkan izin usaha dan lokasi bergeser dari tingkat nasional ke tingkat kabupaten biaya untuk mendapatkan segala dukungan tadi meningkat. Pada sekitar 2015 rente dan palak yang harus dibayar perusahaan untuk mendapatkan izin usaha dan izin lokasi perkebunan sawit seluas 10.000 hektar mencapai sekitar Rp3 miliar, dengan tambahan Rp3 miliar lagi jika diperlukan izin pelepasan hutan.<sup>76</sup> Menduduki lahan konsesi dengan mengusur masyarakat petani penghuninya dan mendapat laporan AMDAL tentu saja perlu biaya tambahan lagi. Setelah semua langkah tadi tuntas barulah perusahaan bisa memperoleh hak guna usaha yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan di Jakarta. Pada gilirannya, izin konsesi memberi perusahaan dua hal penting: hak legal atas tanah untuk dijadikan lahan produksi dan dokumen yang dapat digunakan sebagai jaminan kredit bank untuk mendapatkan biaya usaha. Dilihat secara berurutan, modal investasi perusahaan terutama digunakan untuk membayar rente dan uang palak; sementara pembukaan kebun dan penanaman sawit diongkosi dengan kredit yang didapat dengan menjaminkan izin konsesi.

Praktek ekstraktif melalui pemberian izin konsesi diungkap terang oleh jurnalis investigasi pada 2017 dalam serial berjudul *Indonesia Dijual*. Fokus investigasi tersebut adalah pembiayaan pilkada: bupati di Kalimantan mengeluarkan izin lokasi atas ribuan hektar lahan kepada perusahaan cangkang yang didirikan dalam waktu semalam atas nama teman dan anggota keluarga mereka. Perusahaan cangkang ini kemudian dijual cepat ke perusahaan perkebunan nasional dan transna-

76. Untuk “biaya-biaya tidak resmi” di Kalimantan, lihat Setiawan et al., “Opposing Interests,” 477; untuk Kalimantan Barat, periksa Prabowo et al., “Conversion of Forests.” Lihat juga McCarthy dan Zen, “Regulating the Oil Palm Boom,” 558; McCarthy, Vel, dan Afiff, “Trajectories of Land Acquisition.”

sional dengan harga jutaan dolar dan dana hasil penjualan dialirkan kembali kepada kepala daerah untuk membiayai pemilihan ulang mereka. Pengeluaran dan penjualan izin lokasi dengan cara ini berada di luar definisi korupsi menurut hukum Indonesia. Perusahaan perkebunan membeli izin “bersih” yang tidak dapat mereka akses tanpa keperluan bupati mencari dana pilkada.<sup>77</sup> Konteks yang memungkinkan berlangsungnya kolusi perusahaan dan pejabat pemerintah ini memiliki dua bagian. Pertama adalah mandat perusahaan: politisi berhak mengeluarkan izin lokasi dengan dalih perkebunan membawa kemakmuran bagi daerahnya; yang kedua adalah tidak adanya kekuatan tandingan yang menuntut pertanggungjawaban perusahaan atau politisi. Seperti kita catat sebelumnya, sejak peristiwa 1965–1966 dan pembungkaman perdebatan kritis, tidak lagi ada serikat buruh, partai politik, atau organisasi lain yang mampu mengendalikan kekuatan kolusi gelap-gelapan pengusaha-pejabat-politisi yang telanjur mengakar ini.

Tatanan impunitas Indonesia tidak lantas membuat hukum menjadi tidak relevan, tetapi seperti yang akan kami tunjukkan, peran hukum di kawasan perkebunan menjadi sangat ambigu. Para manajer perkebunan di Tanjung mengacu pada hukum ketika mencoba melindungi perusahaan dari pemerasan para pejabat dan gerakan protes warga desa. Pejabat kecamatan, warga desa, dan karyawan juga mengacu pada hukum ketika mereka menuntut tanggung jawab perusahaan. Namun demikian peran hukum sebagai penyelesai sengketa dilemahkan oleh apa yang kami sebut dengan degradasi hak warga negara masyarakat yang hidup di kawasan pendudukan. Kami akan menganalisis bagaimana hukum bekerja ganda mendukung

77. Gecko Project, *Indonesia for Sale*; mengenai pembiayaan pemilihan kepala daerah dan perluasan perkebunan di Kalimantan Barat, lihat Tim Liputan Mendalam, “Kelapa Sawit, Antara Kepentingan Politik”; di Aceh, lihat Lund, “Predatory Peace”; lihat juga Varkkey, “Patronage Politics as a Driver.”

perusahaan dan membatasi gerak mereka; mandat ganda yang memaksa pejabat melindungi perusahaan di satu sisi dan melindungi “orang kecil” di sisi lainnya; praktik mafia yang menghasilkan uang bagi sejumlah pihak, serta rasa tidak enak yang meruap dari praktik ini.

### *Keuntungan Perusahaan*

Keuntungan perusahaan adalah faktor kunci dalam ekonomi politik perkebunan Indonesia, memang karena demi keuntungan inilah perusahaan datang. Keuntungan juga penting untuk teknologi politik pendudukan perusahaan dan tatanan impunitas yang memungkinkan pendudukan tersebut: tanpa uang untuk menyempal saku beraneka ragam tukang palak dan tukang tuntutan, perusahaan tidak akan mendapat dukungan politik yang mereka perlukan. Menurut para analis industri, usaha sawit Indonesia sangat menguntungkan. Ketika harga minyak sawit mentah (CPO) di atas 770 dolar per ton (harga pelabuhan Rotterdam), perusahaan yang efisien sudah dapat banyak untung. Sementara “pada harga yang lebih tinggi, usaha produksi minyak sawit ini benar-benar menjadi ‘pancuran uang’”.<sup>78</sup> Pada periode 2010–2020 harga rata-rata CPO adalah 809 dolar, jauh di atas ambang pancuran uang.<sup>79</sup> Bahkan pada 2015 ketika harga turun menjadi 600 dolar, sebelas perusahaan perkebunan besar yang beroperasi di hulu (yang mengolah minyak mentah di lokasi kebunnya) mencapai marjin laba kotor rata-rata 27 persen.<sup>80</sup> Dengan kata lain, pada 2015 seorang investor yang membeli kebun sawit berkualitas tinggi siap panen seharga 9.000 dolar per hektar dapat mengharapkan keuntungan langsung sebesar 16,5 persen per hektar per tahun; tidak ada obli-

78. Hawkins, Chen, dan Wigglesworth, *Indonesian Palm Oil Production Sector*, 32.

79. Rata-rata dihitung dari Indexmundi .com.

80. Perhitungan didasarkan pada studi Hawkins, Chen, dan Wigglesworth, *Indonesian Palm Oil Production Sector*, 27.

gasi global mana pun yang bisa menyamainya.<sup>81</sup>

Penting diketahui, bagian hulu memang bagian usaha paling menguntungkan dari bisnis sawit. Beberapa perusahaan transnasional yang terintegrasi vertikal menangani pemurnian minyak sawit mentah produk perkebunan sendiri dan juga pemasarannya, namun proses ini tidak terlalu menguntungkan. Pada 2015 Wilmar Corporation memurnikan 35 persen dari minyak mentah yang diproduksi di kawasan ASEAN, memiliki lima puluh empat kapal curah, dan melakukan pengolahan lanjut, tetapi margin usaha di bagian hilir ini rendah; hanya 8,3 persen untuk seluruh mata rantai kerja, hanya sepertiga dibanding margin hasil usaha rata-rata 27 persen di kegiatan hulu.<sup>82</sup> Margin usaha tebal di bagian hulu ini menjadi insentif kuat bagi perusahaan untuk mencari lahan dan terlibat langsung dalam budidaya sawit, dan bank yang membiayai kerja tersebut beserta para kroni yang mendukung mereka semua mendapat bagian dari insentif tersebut.<sup>83</sup> Bagi pengusaha, memusatkan kerja pada pengolahan hilir dan menyerahkan budidaya sawit kepada petani kecil bukanlah langkah bisnis yang menguntungkan.

Seperti di masa kolonial, perusahaan perkebunan dan para kroninya memiliki insentif untuk menekan produksi mandiri petani kecil karena petani kecil menggembosi monopoli mereka atas lahan dan tenaga kerja, serta mengancam narasi bahwa hanya perusahaan perkebunan yang mampu memproduksi dengan efisien. Namun berlawanan dengan narasi ini, banyak penelitian mengonfirmasi bahwa petani kecil dapat menghasilkan panen sawit per hektar sebanyak panen kebun milik perusahaan, dan “tidak ada kekhususan agronomis sawit yang membe-

81. Hawkins, Chen, dan Wigglesworth, *Indonesian Palm Oil Production Sector*, 3–4.

82. Hawkins, Chen, dan Wigglesworth, *Indonesian Palm Oil Production Sector*, 27–28.

83. Mengenai sumber modal untuk perusahaan perkebunan, lihat Cramb dan McCarthy, “Characterising Oil Palm Production,” 36, 46–48; TuK Indonesia, “Banks behind Indonesian Palm Oil.”

narkan perlunya kehadiran dominan perkebunan sebagai pola pembangunan.”<sup>84</sup> Budidaya sawit tidak rumit, bahkan di perkebunan juga tidak ada mekanisasi. Hal itu membuktikan tidak ada persoalan teknis skala usaha di sini. Pekerja menyanggul, memupuk, dan panen secara manual. Petani mandiri yang punya akses ke bibit unggul dan pupuk serta merawat kebun dengan tekun bisa mencapai panen per hektar setara atau bahkan lebih tinggi dari panen kebun perusahaan; biaya produksi per ton mereka juga jauh lebih rendah karena mereka tidak perlu membayar manajer, mandor, dan satpam.<sup>85</sup>

Persoalan teknis utama kebun sawit adalah pabrik pengolahan dan transportasi. Pohon sawit menghasilkan tandan buah segar yang harus dipanen setiap dua minggu dan diproses di pabrik dalam jangka empat puluh delapan jam sebelum kualitas minyak turun. Jalur jalan yang lancar dan kapasitas pabrik pengolahan yang memadai menjadi urusan genting di sini. Meskipun sebenarnya pabrik kecil untuk lima ratus hektar kebun sawit dapat bekerja baik, perusahaan lebih menyukai pabrik besar yang terhubung dengan 10 ribu hingga 20 ribu hektar kebun untuk menjamin kelangsungan pasokan sawit segar.<sup>86</sup> Oleh karena itu yang tumbuh kemudian adalah pabrik raksasa yang melahap panen kebun raksasa dan mencetak laba raksasa yang semuanya sah secara hukum. Sementara cara-cara alternatif budidaya sawit dan mengolah minyak tidak mendapat dukungan dari pemerintah maupun perusahaan.

84. Feintrenie, Chong, dan Levang, “Why Do Farmers Prefer Oil Palm?,” 394. Lihat juga Cramb dan McCarthy, “Characterising Oil Palm,” 32; Byerlee, “Fall and Rise Again.” Cramb dan Ferraro, “Custom and Capital,” membandingkan imbalan yang diterima perusahaan, pemerintah, dan warga desa menurut jenis tanaman produksinya.
85. Cramb dan McCarthy, “Characterising Oil Palm Production,” 32; mengenai ukuran kebun dan produktivitas lihat Carter, “Inverse Relationship”; lihat juga Bissonnette dan De Koninck, “Return of the Plantation?”
86. Mengenai peraturan ukuran pabrik, lihat Cramb dan McCarthy, “Characterising Oil Palm Production,” 34–36.

Menurut statistik resmi, pada 2015 total luas kebun sawit di Indonesia mencapai sedikitnya 12 juta hektar; dengan sekitar 8 juta hektar lagi ada dalam kategori perkebunan tanpa izin, kebun kecil swasta yang tidak tercatat, dan “bank tanah” perusahaan.<sup>87</sup> Secara nasional, industri ini terdiri atas lima komponen: (1) Perusahaan perkebunan milik negara (PTPN) yang menguasai sekitar 9 persen dari luas kebun. (2) Perusahaan swasta yang terdaftar di pasar saham nasional maupun asing menguasai sekitar 23 persen.<sup>88</sup> (3) Perusahaan swasta pribadi (terutama milik warga Indonesia) menguasai sekitar 23 persen. Sisanya, sekitar 44 persen, ditangani oleh petani kecil, dengan variasi distribusi menurut provinsi yang signifikan.<sup>89</sup> Petani kecil terbagi antara (4) petani plasma yang terikat kontrak dengan perusahaan yang berkewajiban menyediakan kapling kebun untuk petani setempat sebagai imbalan untuk mereka yang diambil lahannya;<sup>90</sup> dan (5) petani mandiri. Dalam kategori petani

87. Orang-orang terkaya Indonesia punya saham besar dalam perusahaan perkebunan sawit transnasional yang didaftarkan di bursa saham Singapura, Malaysia, dan London, jadi “transnasional” tidak langsung berarti “non-Indonesia.” Lihat TuK Indonesia, *Tycoons*. Mengenai bank tanah dan *land grab* “virtual”, lihat McCarthy, Vel, dan Affif, “Trajectories of Land Acquisition.” Berita surat kabar melaporkan jutaan hektar kebun sawit tidak terdaftar. Lihat Butler, “Half of Riau’s Oil Palm”; “Hasil Studi IUCN, Pencerahan Untuk Kampanye Hitam Kelapa Sawit,” *Kompas*, 4 Februari 2019; “Perkebunan Sawit Tanpa Ijin Marak,” *Kompas*, 22 Februari 2010. Sekalipun ada moratorium resmi pembukaan perkebunan baru di hutan primer atau rawa gambut, perluasan kebun terus berjalan; lihat “Effectiveness of Indonesian Palm Oil Moratorium Disputed,” *Bangkok Post*, 1 Oktober 2018.
88. Hawkins, Chen, dan Wigglesworth, *Indonesian Palm Oil Production Sector*, 10, 23; TuK Indonesia, *Tycoons*; lihat juga Pichler, “Legal Dispossession,” 522; Dwyer, *Trying to Follow the Money*, 15.
89. Data dihitung dari Statistik Kelapa Sawit Indonesia menunjukkan pada 2017 empat provinsi utama sawit di Sumatra (Riau, Jambi, Sumatra Utara, Sumatra Selatan) memiliki 7 juta hektar kebun sawit, 53 persen milik perkebunan, 47 persen milik petani kecil. Tiga provinsi Kalimantan (Barat, Tengah, dan Timur) memiliki 3,9 juta hektar, 77 persennya merupakan perkebunan dan 23 persen kebun petani. Riau adalah provinsi dengan porsi petani kecil tertinggi, 69 persen.
90. Jenis-jenis program petani plasma diuraikan dalam Cramb dan McCarthy, “Characterising Oil Palm Production.”

mandiri termasuk pendatang yang membeli lahan dari pemilik tanah adat atau merambah hutan primer dengan dukungan pejabat setempat; pejabat pemerintah, manajer perkebunan, profesional perkotaan, dan pengusaha yang membeli tanah dan mempekerjakan manajer untuk menjalankan perkebunan tanpa izin. Termaktub di sini pula para pemilik tanah adat yang menanam sawit di lahan mereka sendiri sebagai sumber penghasilan rumah tangga yang menguntungkan.<sup>91</sup> Berbagai ragam pola membudidaya sawit hadir di Tanjung dan kami akan mengungkap lebih jauh masing-masing pola usaha tersebut.

### Di Dalam Dunia Perkebunan

Rezim-rezim ekstraktif membentuk dunia perkebunan, tetapi rezim ini bukan satu-satunya elemen yang bermain. Studi ini bukan hanya diarahkan pada apa yang dapat diambil dari perkebunan (sawit, laba, pendapatan, rente) atau apa yang dihancurkan pendudukan perusahaan (hak adat atas tanah, pertanian tumpangsari, ekologi yang beragam, hak warga negara yang “normal”). Di sini kami juga tertarik untuk mengungkap bentuk-bentuk kehidupan yang dilahirkan oleh perkebunan, yang sebenarnya sudah dikaji dalam berbagai studi. Kami memetik beberapa pemikiran kunci dari berbagai studi tersebut dengan kewaspadaan bahwa penggunaan istilah perkebunan bisa merujuk pada ekuivalensi yang tidak tepat. Seperti kata kunci “proletar” yang diperiksa oleh antropolog James Ferguson, kata

91. Untuk tipologi petani kecil, lihat Zen, Barlow, dan Gondowarsito, *Oil Palm*; McCarthy, “Processes of Inclusion”; McCarthy, Gillespie, dan Zen, “Swimming Upstream”; Molenaar, *Diagnostic Study*; Jelsma et al., “Unpacking”; Potter, “How Can the People’s Sovereignty”; Daemeter Consulting, *Overview of Indonesian Oil Palm*; Rist, Feintrenie, dan Levang, “Livelihood Impacts of Oil Palm”; Feintrenie, Chong, dan Levang, “Why Do Farmers Prefer Oil Palm?”; Serikat Petani Kelapa Sawit, *Karakteristik dan Definisi*. Kebun di atas 25 hektar secara hukum dianggap sebagai perkebunan dan harus dilengkapi dengan izin perkebunan.

“perkebunan” datang dengan membawa “arti pada penggunaan sebelumnya [yang] mengarahkan pada asosiasi analogis di mana kasus-kasus historis atau pun paradigmatik sosiologis dapat mematok istilah (bahkan secara harfiah) yang kita gunakan dalam menjelaskan dan melakukan perbandingan dengan berbagai kasus lain.”<sup>92</sup> Oleh karena itu kami tidak mencoba untuk membandingkan perkebunan dalam studi ini sebagai variasi dari tipe ideal tertentu, tetapi menangkap beberapa elemen kunci dan resonansinya di berbagai konjungtur yang berbeda.<sup>93</sup>

Perkebunan budak di Amerika memiliki beberapa ciri organisasi yang sama dengan perkebunan kelapa sawit kontemporer Indonesia (budidaya tanaman tunggal, pembagian kerja berdasarkan tugas, tata letak yang teratur, pengawasan yang ketat), tetapi tata sosial yang melingkupi kehidupan karyawan perkebunan negara Natco, sejak mereka masuk sampai pensiun, lebih mirip dengan tata kehidupan kota-kota perusahaan abad ke-20. Kesamaan lingkungan politik membuat kawasan perkebunan Tanjung banyak kemiripan dengan kawasan tambang emas Batu Hijau Newmont di Indonesia timur, yang dicermati antropolog Marina Welker. Perbedaan keduanya berpusat pada pengaturan ruang: tambang Batu Hijau menempati kawasan yang terkonsolidasi seluas 400 hektar yang dijaga ketat, sedangkan di Tanjung lima perkebunan menghampar tempel-menempel di wilayah seluas 65.000 hektar.<sup>94</sup>

Secara teknis perkebunan sawit di Indonesia dan Malaysia sama saja, tetapi konteks yang melingkupinya berbeda. Di Malaysia, generasi muda desa memiliki prospek yang baik untuk

92. Ferguson, “Proletarian Politics,” 4.

93. Mengenai konjungtur dan perbandingan relasional Hart, *Disabling Globalization*.

94. Welker, *Enacting the Corporation*, 131. Mengenai penataan spasial yang berbeda-beda di zona-zona ekstraktif, lihat Ferguson, “Seeing Like an Oil Company”; Côté dan Benedikt Korf, “Making Concessions”; Watts, “Tale of Two Gulfs”; Appel, *Licit Life of Capitalism*.

mendapat pendidikan dan pekerjaan di kota, oleh karena itu pendudukan tanah orang tua mereka tidak serta merta merampas masa depan yang mereka inginkan. Sementara pekerjaan kebun diserahkan pada pekerja migran Indonesia. Sebaliknya di Indonesia, kaum muda pedesaan harus berjuang keras untuk mendapat pekerjaan yang mendatangkan upah, sehingga bagi mereka mempertahankan tanah keluarga yang diincar oleh perusahaan mungkin merupakan pilihan terbaik mereka.<sup>95</sup> Seperti yang ditekankan oleh ahli geografi Michael Watts, komoditas tidak menentukan sistem teknis di lapangan, sistem tersebut lebih dibentuk oleh dinamika politik dan ekologi di tempat komoditi tersebut disisipkan.<sup>96</sup>

Hubungan antara perkebunan dan formasi sosial, ekonomi, dan politik di sekitarnya merupakan tema klasik penelitian perkebunan. Ekonom George Beckford telah menyoroti “kemiskinan berkepanjangan” dan ketertinggalan wilayah Karibia akibat berabad-abad kehadiran perkebunan, yang tanpa henti mengalirkan produk dan keuntungan ke luar negeri.<sup>97</sup> Temuannya membawa gema luas yang selalu diabaikan oleh para pendukung perkebunan yang terus mengulangi mantra kapitalisme global yang menyamakan kedatangan perusahaan perkebunan dengan kemakmuran dan pembangunan masyarakat pedesaan. Pada studi yang lebih detail, penelitian oleh antropolog Michel-Rolph Trouillot, Julian Steward, Eric Wolf, dan Sydney

95. Perbedaan antara konteks nasional untuk kelapa sawit di Malaysia dan Indonesia dieksplorasi dalam Cramb and McCarthy, “Characterising Oil Palm Production.”

96. Watts, “Tale of Two Gulfs”; lihat juga Hall, Hirsch, dan Li, *Powers of Exclusion*, 88. Untuk contoh etnografi perkebunan kontemporer yang menghasilkan tanaman berbeda, lihat berikut ini: tentang tembakau di AS, lihat Benson, *Tobacco Capitalism*; tentang teh di India, lihat Besky, *Darjeeling Distinction*; dan tentang pisang di Ekuador, lihat Striffler, *In the Shadows*. Untuk penelitian komparatif seminal tentang perkebunan kolonial di Asia, lihat Daniel, Bernstein, dan Brass, *Plantations, Proletarians and Peasants*.

97. Beckford, *Persistent Poverty*.

Mintz mengungkap keragaman hubungan antara perkebunan dan masyarakat sekitar yang terlibat dalam pekerjaan musiman di perkebunan atau yang tetap bekerja usaha pertanian sendiri. Temuan mereka kami jadikan dasar untuk membangun konsep baru kawasan perkebunan sebagai *variegated space*, ruang yang menampung beragam relasi.<sup>98</sup>

Menyoroti ko-konstitusi perkebunan dan lingkungan sosial mereka, sosiolog Edgar Thompson berpendapat bahwa perkebunan budak di AS Selatan tidak hadir sendirian tetapi merupakan bagian dari konstelasi institusi yang lebih besar seperti gereja, pemerintahan, dan sekolah yang ditenun dengan konsep ras.<sup>99</sup> Sydney Mintz membangun pemikirannya di atas karya Thompson saat dia menelusuri perjalanan perkebunan gula melalui pola konsumsi dan sejarah kapitalisme global.<sup>100</sup> Sarjana kontemporer yang mempelajari geografi kaum kulit hitam seperti Katherine McKittrick, Deborah Thomas, dan Michaeline Crichlow berpendapat bahwa dalam cara yang beragam efek sistem perkebunan yang rasial terus bergema dalam tatanan sosial orang Amerika Serikat dan Karibia berabad-abad setelah perbudakan berakhir.<sup>101</sup> Seperti para ahli tersebut menunjukkan, dunia baru yang diciptakan oleh perkebunan tidak hanya meluber ke daerah sekitar perkebunan berada, tema yang kami bahas dalam studi ini, tetapi bisa jauh melewati batas wilayah dan waktu hidup mereka.

Kualitas mekanis yang dimiliki, reduksi spesies yang dilakukannya, replikasinya, dan ukuran wilayahnya yang sangat besar membuat perkebunan punya daya ubah dunia, seperti

98. Steward et al., *People of Puerto Rico*; Mintz, "Rural Proletariat and the Problem" dan *Worker in the Cane*; Trouillot, *Peasants and Capital*.

99. Edgar Tristram Thompson, *Plantation*.

100. Mintz, *Sweetness and Power*. Mintz menulis kata pengantar untuk buku Thompson.

101. Lihat McKittrick, "Plantation Futures"; Crichlow dan Northover, *Globalization and Creole Identities*; Thomas, *Political Life in the Wake*.

yang ditekankan oleh Donna Haraway, Anna Tsing, dan para ahli lain. Mereka mengajukan gagasan bahwa sejak lima ratus tahun terakhir ini manusia hidup dalam “zaman perkebunan.” Pada “perkebunan tebu mereka di Brasil abad ke-16 dan ke-17,” tulis Tsing, “Para pekebun Portugis menemukan rumus untuk memperluas perkebunan secara mulus. Rumus tersebut memiliki unsur-unsur yang dapat digesar-geser urutannya, sebagai berikut: memusnahkan penduduk dan tumbuhan lokal; menyiapkan lahan tanah yang sekarang kosong dan tidak ada pemilikinya; dan mendatangkan tenaga kerja dan tanaman yang eksotis dan terisolasi untuk menjalankan produksi. Model lanskap yang bisa naik turun skalanya ini kemudian menjadi inspirasi bagi industrialisasi dan modernisasi di kemudian hari.”<sup>102</sup> Deskripsi Tsing menangkap ciri pokok perkebunan tetapi seperti yang diakui Tsing sendiri, dan juga seperti yang dikonfirmasi oleh penelitian kami di Tanjung, operasi yang diperlukan untuk membangun dan menjalankan perkebunan jauh lebih kompleks daripada yang digambarkan oleh model di atas. Manusia dan tumbuhan tidak sepenuhnya bisa dimusnahkan; wilayah tidak benar-benar bisa dikosongkan; tenaga kerja tidak cukup terisolasi; dan perkebunan diterima dan ditentang oleh kekuatan sosial dan agensi non-manusia yang beragam yang membuat perkebunan rapuh di berbagai sisi.

Analisis etnografis ini kami memperhatikan kehadiran koh material perkebunan, kekuatan besar yang mendukungnya, kerapuhan mereka, dan perlawanan yang terus berlangsung terhadap kehadiran mereka. Kami mengambil inspirasi dari cerita Alexei Yurchak tentang pengalaman rakyat Soviet sebelum runtuhnya sosialisme, suasana hati mereka ditangkap jelas oleh judul bukunya: *Semua Abadi, Sampai Segalanya Hilang*. Yurchak

102. Tsing, *Mushroom at the End*, 39; lihat juga Haraway dan Tsing, “Reflections on the Plantationocene”; Davis et al., “Anthropocene, Capitalocene.”

menunjukkan bagaimana keruntuhan sosialisme itu

benar-benar tidak terduga oleh sebagian besar orang Soviet, namun begitu orang sadar bahwa sesuatu yang tidak terduga sedang terjadi, mereka juga langsung sadar bahwa sebenarnya mereka telah bersiap menerima perubahan tidak terduga itu... Selama bertahun-tahun sistem tersebut mempunyai dua sisi yang bertentangan: ia abadi dan merapuh, penuh kekuatan dan kesuraman, didedikasikan untuk cita-cita tinggi dan juga kosong melompong. Tak satu pun dari posisi tersebut merupakan topeng. Mereka masing-masing nyata dan... saling mendukung.<sup>103</sup>

Wajah ganda yang diidentifikasi oleh Yurchak terwujud dalam ruang, praktik, dan rasa hati kontradiktif yang mudah ditemui di kawasan perkebunan. Dari satu perspektif, perkebunan Indonesia adalah situs contoh modernitas. Mereka dibangun dengan pembuatan ruang bersih tabula rasa dan penggunaan bulldoser untuk menebang pohon, membuat teras di lereng bukit, dan menghilangkan semua tanda bahwa hutan dan kampung sebelumnya hadir di sana. Penggantian beragam spesies tumbuhan dengan barisan tanaman yang seragam, bersama dengan bangunan kantor yang ditata rapi dan dijaga, kompleks perumahan, dan pabrik besar, membuat para profesional perkebunan bangga. Dari perspektif lain, lanskap perkebunan adalah situs kehancuran dan wahana perusakan. Perkebunan bukanlah ruang tunggal yang ditentukan oleh rencana negara dan perusahaan.

Mengikuti Donald Moore, kami memperhatikan “konsekuensi lanjut materialitas lingkungan” sambil meninjau perkebunan sebagai “lanskap yang dijerat” oleh banyak relasi di mana “berbagai spasialitas” berbaur dan berpisah melintasi sumbu

103. Yurchak, *Everything Was Forever*, 282. Terima kasih kepada Andrea Muehlebach yang telah menyarankan resonansi ini.

### Gambar P.2 Barisan Sawit Kering



Keadaan ruang dapat menimbulkan rasa hati yang beragam. Contohnya diilustrasikan dalam foto barisan pohon sawit yang mati. Sawit mendominasi lanskap perkebunan tetapi tidak menghilangkan bentuk kehidupan lain: ada serangga dan jamur, pakis dan lumut kerak, rumput dan semak belukar yang bersaing dengan sawit berebut cahaya, air, dan nutrisi; tikus yang memakan buah sawit; ular yang memangsa tikus dan kadang juga mengganggu pekerja; dan sapi yang dipelihara karyawan untuk menambah penghasilan. Batang sawit di foto ini disuntik mati dengan herbisida karena sudah terlalu tinggi untuk dipanen dengan egrek, teknologi murah yang disukai perusahaan. Bagi Pujo, sawit kering ini tampak seperti barisan resimen hantu, sosok tragis yang diam menunggu perintah yang tidak pernah datang. Bagi para karyawan yang mendekati masa pensiun, pohon-pohon kering ini adalah pengingat menakutkan akan masa depan mereka sendiri: demikian juga selesai dipakai mereka akan dibuang. Bagi mantan pemilik tanah, pembunahan pohon ini menunjukkan tiadanya rasa hormat kepada Ibu Alam; yang lebih mengkhawatirkan, bibit sawit baru yang sudah ditanam di bawah batang yang sekarang itu menunjukkan bahwa perusahaan berniat melanjutkan konsesinya. Bagi para manajer kebun, pohon sawit yang mati kering itu memang sudah sebagaimana mestinya, tetapi pohon baru yang ditanam hidup memalukan: mereka dikepung rumput liar dan teras “tapal kuda” tempat mereka ditanam terlalu kecil ukurannya. Seorang buruh yang dipekerjakan oleh pemborong untuk membuat tapal kuda menceritakan bahwa pemborong berkolusi dengan

manajer kebun untuk mendapat anggaran dari Natco sebesar Rp60.000 per tapal kuda, namun hanya Rp17.000 sampai kepadanya sebagai upah kerja banting tulang mencangkul di bawah terik matahari. Tersinggung oleh apa yang dia lihat sebagai kerakusan manajer yang tiada tara, si buruh membuat terasnya lebih kecil dari ukuran seharusnya tetapi masih cukup besar agar dia bisa mempertahankan pekerjaannya. *Foto: Stéphane Bernard.*

---

ketimpangan sosial, identitas, dan kekuasaan.<sup>104</sup> Kami menarik wawasan lebih lanjut dari Yael Navaro-Yashin, yang menunjukkan bagaimana bentuk arsitektur, objek, dan praktik administrasi punya daya menimbulkan rasa hati tertentu. Navaro-Yashin mengungkap “rasa ngeri yang meruap” dari benda-benda yang ditinggal mengungsi atau rusak dijarah; ketakutan dan kecemasan yang muncul dari pertanyaan “apa yang mungkin terjadi jika Anda melangkah keluar dari tempat Anda yang tepat”; dan melankoli saat orang “kehilangan rasa integritas moral.”<sup>105</sup> Dalam semangat inilah kami menggunakan foto untuk mengeksplorasi pengaruh yang dihasilkan oleh ruang, objek, dan praktik berdasarkan pengalaman kita sendiri dan yang diceritakan oleh kawan bicara kita (Gambar I.2).

Memperhatikan “materialitas lingkungan” mendorong kita untuk mempertimbangkan bagaimana perusahaan membentuk batas material maupun sosial, misalnya, perekrutan dan penghentian karyawan, perbedaan antara penduduk dan tamu, dan perbedaan tata letak antara perkebunan dengan kebun petani dan desa sekitarnya. Praktik ini menghasilkan subjek dengan identitas yang berbeda. Biasanya pensiunan pekerja menghindari lewat kompleks perkebunan karena merasa bukan tempatnya lagi. Kami mengidentifikasi praktik-praktik yang dija-

104. Moore, *Suffering for Territory*, 22–24.

105. Navaro-Yashin, *Make-Believe Space*, 20, 75, 174.

lankan bergantian untuk mengikat karyawan dan manajer ke perusahaan, lantas di satu waktu nanti untuk mengusir mereka. Kami menanyakan mana kegiatan dengan manusia, spesies non-manusia, dan teknologi yang mendatangkan kebanggaan, mana yang menimbulkan keterasingan dan mana yang mengundang penolakan. Kami melacak bagaimana pejabat pemerintah, manajer kebun, pekerja, dan warga desa menjadi ikut serta dalam berbuat kerusakan dan rasa gelisah yang timbul dari keterlibatan tersebut.

Dalam konteks yang dikaji oleh Navaro-Yashin (“ruang pura-pura percaya” bagi bangsa yang tidak diakui kebangsaannya) dan Yurchak (akhir pemerintahan Soviet), orang-orang yang tidak mengungkapkan kritik terbuka tetap mengalami rasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupan di mana tidak ada hal yang benar-benar (atau hanya) seperti apa yang dinyatakannya. Inilah dunia yang munafik, dunia penuh pengkhianatan, panggung sandiwara, rahasia umum, dan kebohongan hidup serta harapan indah dan cita-cita muluk. Kehidupan perkebunan yang kami temui di Tanjung memiliki wajah ganda seperti itu: mesin birokrasi rasional yang juga raksasa tukang jahar; manajer yang teknisi sekaligus pencuri; janji-janji kemakmuran yang benar dan palsu; lingkungan yang bersih dan juga penuh parasit; semua orang dapat merasa ada sesuatu yang salah dengan kehidupan perkebunan, tetapi itu juga dunia yang mereka tahu bagaimana cara melayarinya.

Novelis dan intelektual Jamaika Sylvia Wynter menawarkan pandangan kritis mengenai watak ganda kehidupan perkebunan dan ambivalensi yang dimunculkannya. Dia menempatkan titik tumpu ambivalensi pada relasi diadik “lahan perkebunan dan petak sayur.” Meskipun lahan perkebunan menjadi bahan pokok narasi utama kehidupan perkebunan budak, Wynter berpendapat bahwa petak sayur—sebidang kecil tanah yang diberikan perkebunan kepada para budak untuk diolah menjadi

penyedia pangan mereka sendiri—yang melengkapi “sejarah rahasianya.” Yang terpenting, Wynter mengenali karakter petak sayur yang menguatkan kehidupan para budak tanpa menghindari kontradiksinya. Petak sayur yang memungkinkan kelangsungan hidup, kreativitas, dan sosialitas juga meningkatkan keuntungan perkebunan dengan mengurangi biaya para tuan untuk memasok makanan budak-budaknya. Berdasarkan karya Wynter, Katherine McKittrick menyatakan bagaimana petak sayur “menggambarkan tatanan sosial yang dibangun dalam sistem yang tidak manusiawi,” sebuah tatanan yang berisi pembangkangan dan juga keterlibatan.<sup>106</sup> Pekerja perkebunan di Tanjung tidak mendapat kebun sayur untuk subsistensi mereka, mereka menggantikannya dengan pencurian dan pemangsaan sebagai cara bertahan hidup dan sebagai protes. Pencurian mengikat pekerja ke perkebunan tetapi meninggalkan mereka dengan rasa tidak enak; menjadi pencuri memiliki unsur kemenangan, tapi itu bukan alasan untuk perayaan.

.....

Kami mengerjakan penelitian dan buku ini karena ada kegentingan yang sangat mendesak. Warga kota di Malaysia, Indonesia, dan Singapura mengenal perkebunan terutama dari siksaan kabut asap yang bisa berlangsung berbulan-bulan: udara kotor pekat akibat kebakaran hutan, yang biasanya berkait dengan pembukaan lahan perkebunan. Media di Indonesia jarang meliput daerah pedesaan yang tampak perifer dalam dinamika ekonomi dan politik negara. Konflik lahan, korupsi, gerakan protes, dan blokade adalah berita yang umum di kota-kota yang dekat dengan kawasan perkebunan, tetapi hanya kasus-kasus

106. McKittrick, “Plantation Futures,” 11; Wynter, “Novel and History”; lihat juga Hawthorne, “Black Matters Are Spatial Matters.”

paling mengerikan yang melibatkan cedera atau kematian yang menyebabkan kegemparan.<sup>107</sup> Selama beberapa dekade terakhir para pengamat yang berbeda posisi dengan perkebunan telah melancarkan berbagai kritik, tetapi kritik mereka tidak menca- but klaim bahwa perkebunan membawa kemakmuran ke wila- yah pedesaan. Perdebatan tentang sawit sangat terpolarisasi. Di satu sisi politisi, pejabat, dan pendukung perusahaan terus me- nekankan adanya kontribusi industri sawit bagi kemakmuran nasional. Di sisi lain para kritikus menyoroti risiko ekologis dari budidaya tanaman tunggal, hilangnya hutan dan spesies, serta pelanggaran hak asasi manusia dan tenaga kerja.<sup>108</sup> Ba- nyak pengamat tidak yakin bagaimana harus menimbang man- faat dan kerugian dari kehadiran perkebunan sawit.

Pada 2012 Bupati Sanggau membuka seminar yang kami selenggarakan untuk mempresentasikan hasil awal penelitian kami dengan pidato optimis: Sanggau berkembang pesat karena sawit. Pak Jaelani, tetua Dayak terkemuka yang hadir dalam se- minar itu, merasa skeptis. Dia mengusulkan pemeriksaan la- pangan, *ground-checking*. “Sudah tiga kali saya ajukan ke DPRD provinsi, bahwa kita perlu tim politisi, pejabat, intelektual, per- usahaan, petani, dan LSM bersama-sama datang ke lapangan, kita siapkan kuesioner untuk mengetahui dengan pasti: dapat- kah sawit memberi kita kesejahteraan hingga ke masa depan? Jika iya, maka tentu saja kita semua akan setuju, tetapi jika

107. Jong, “Study Puts a Figure.” Pasukan militer dan polisi bersenjata dikerahkan dalam konflik tanah yang berimbas kepada kematian, cedera, dan pemenjaraan para pemrotés. Lihat Sri Palupi et al., *Industri Perkebunan Sawit*; Komnas HAM, *National Inquiry*; Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), *Catatan Akhir Tahun 2018*.

108. Tentang kelapa sawit sebagai sumber manfaat pembangunan, lihat the Palm Scribe (<https://thepalmscribe.id/about/>) dan asosiasi industri Indonesia GAPKI (<https://gapki.id/>). Untuk perspektif kritis, lihat Sawit Watch (<https://sawit-watch.or.id/>); WALHI (<https://walhi.or.id/>); Mongabay (<https://www.mongabay.co.id/>); the Forest Peoples Programme (<https://www.forestpeoples.org/en/about>); dan Down to Earth (<http://www.downtoearth-indonesia.org/>).

tidak, mengapa kita terus melanjutkan sawit?" Kehadiran kelapa sawit yang masif di Kabupaten Sanggau membuat pertanyaan Pak Jaelani sangat mendasar: Bisakah sawit memberikan kesejahteraan masyarakat di masa depan atau tidak? Dengan tepat dia mencatat bahwa tidak ada banyak data yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan itu.

Sebagian besar kebun sawit di Kalimantan dibuka oleh perkebunan yang terus berdatangan dengan membawa janji manfaat yang belum dikonfirmasi, sementara banyak kerugian yang dilaporkan tidak ditangani. Buku kami mendalami proses dan praktik yang menghasilkan manfaat dan kerusakan di kawasan perkebunan dan mendistribusikan keduanya secara tidak merata. Namun sekali lagi, utamanya studi ini adalah untuk menelusuri bagaimana perusahaan perkebunan membongkar ulang lanskap dan sumber penghidupan, membentuk subjek baru, dan menciptakan bentuk kehidupan baru.

Dalam penelitian ini kami mengajukan serangkaian pertanyaan.

Di Bab 1 kami bertanya: *Bagaimana perkebunan Natco dan Priva bisa berdiri di Tanjung, dan hubungan-hubungan baru apa yang dihasilkan oleh kehadiran mereka?* Kami memeriksa premis yang melekat pada proses pengambilan lahan, taktik yang digunakan untuk memperoleh dan mempertahankan lahan, dan kerapuhan yang dihasilkan baik bagi perusahaan yang menduduki maupun orang Melayu dan Dayak yang wilayahnya diduduki.

Di Bab 2 kami bertanya: *Siapa yang bekerja di kedua perkebunan ini dan mengapa?* Pekerja perkebunan sekarang ini adalah pekerja bebas, oleh karena itu kehadiran pekerja merupakan indikator bagaimana mereka menilai risiko fisik, finansial, dan moral serta hasil yang didapat. Kami memeriksa bagaimana perkebunan Natco dan Priva mempekerjakan dan menghentikan karyawan, teknologi politik yang menjaga kepatuhan yang rapuh, dan hubungan predasi yang muncul.

Dalam Bab 3 kami bertanya: *Apa arti keterikatan petani plasma pada perusahaan?* Kami mengembangkan analisis dengan membandingkan kerapuhan ekstrem petani plasma yang sumber kehidupannya bergantung pada perkebunan Priva dengan ketangguhan relatif petani Melayu dan Dayak independen yang memiliki kebun, tenaga kerja, dan modal usaha mereka sendiri.

Di Bab 4 kami bertanya: *Apa saja bentuk-bentuk kehidupan yang muncul di kawasan perkebunan?* Kami memeriksa pelaksanaan hukum sehari-hari karena hal tersebut memungkinkan dan juga membatasi gerak perkebunan, hierarki dan ketegangan yang dilahirkan oleh proyek modernitas di perkebunan Natio, dan perjuangan hidup sehari-hari para bekas pemilik lahan yang tinggal di enklaf-enklaf kecil yang diduduki dan sekaligus ditelantarkan perusahaan.

Di Bab 5 kami bertanya: *Mengapa perusahaan perkebunan sawit masih berkembang di seluruh Indonesia?* Dua puluh tahun analisis kritis tidak berhasil meruntuhkan argumen bahwa perkebunan membawa kemakmuran ke daerah terpencil, dan reformasi untuk membuat perkebunan lebih “berkelanjutan” malah memberinya napas baru. Kami mengeksplorasi keterbatasan agenda reformasi dan kekuatan yang dikerahkan untuk mendukung kelangsungan perusahaan dengan mengorbankan para petani kecil.

Simpulan kami menyoroti peran pendudukan perusahaan dalam perluasan jangkauan kapital global dan memaksa jutaan penduduk desa Indonesia hidup di bawah kuasa perkebunan, yang tidak dapat mereka kendalikan.